



TBNews

TRIBRATA

AKTUAL & FAKTUAL



HARI BHAYANGKARA, 79 TAHUN MENGABDI PADA NEGERI



TRIBRATAnews • Edisi V 2025

MEMBUKA RUANG TRANSPARANSI PUBLIK



POLRI UNTUK MASYARAKAT

Presiden dan Petani Apresiasi Peran Polri Dorong Ketahanan Pangan

DIVISI HUMAS POLRI



Pelindung
KAPOLRI, WAKAPOLRI

Penasehat
KADIVHUMAS POLRI

Ketua Pengarah
**KARO PENMAS, KARO PID, KARO MULTIMEDIA,
PENATA KEHUMASAN POLRI UTAMA**

Staf Ahli
PARA KABAG DIVHUMAS POLRI

Pemimpin Redaksi
**KOMBES POL. BAMBANG TJAHJO BAWONO, S.I.K.,
S.H., M.HUM., M.SI.**

Staf Redaksi
**KOMPOL RUDI HARTONO, S.Kom., S.I.K.,
M.Kom., M.I.K.**

**PEMBINA AGUSTIN EKAWATI, S.E.
IPTU DITA PRIMA JUWITA, S.I.Kom.
IPDA NIFRINAS YULISTIN RIZKY, S.I.Kom.
PENDA I HARYATI, S.E.**

**IPDA I DEWA GEDE YUDHA PERWIRA ADHI
PRADNYANA, S.Kom.
BRIGADIR AMANDA SILFIA, S.H.
BRIPDA ALDI RASYID
BRIPDA IRSYAD KOVA ANUGRAH SIREGAR
BRIPDA CINTA AMELIA PUTRI AHMAD**

Art Director
AGUNG SUPRIYANTO WIDADI, S.Ds.

Fotografer
**BAG PRODDOK
DIVHUMAS POLRI**

Penerbit
**BAG PENSAT
DIVHUMAS POLRI**

Kontributor
SATKER MABES/SATWIL POLDA

Percetakan
PT Arfi Dua Satu

Alamat Redaksi
**Bag Pensat Biro Penmas Divisi Humas Polri
Jalan Trunojoyo No. 3
Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7218141, 7218770
Faks. (021) 7260208, 7218141**

E D I T O R I A L

Polri Untuk Masyarakat

Tanggal 1 Juli merupakan hari bersejarah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Merunut sejarahnya, Hari Bhayangkara sejatinya bukanlah hari lahir Polri melainkan momentum turunnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946.

Melalui aturan tersebut kepolisian yang semula terpisah sebagai kepolisian daerah menjadi satu kesatuan nasional yang tunggal. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Polri berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara yang masih rentan terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Tahun ini pada Hari Bhayangkara 1 Juli 2025 genap berusia 79 tahun, Polri mencatat sejumlah kiprah positif khususnya dalam upaya mendukung Asta Cita yang menjadi visi menuju Indonesia Emas 2045.

Hari Bhayangkara tentu bukan sekadar peringatan formal semata, melainkan momen reflektif untuk menumbuhkan kesadaran tentang peran fundamental Polri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada momentum itu, Polri diingatkan kembali akan jati dirinya sebagai pengemban tugas mulia dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan rasa aman di tengah masyarakat.

Salah satu refleksi utama dari peringatan Hari Bhayangkara adalah komitmen institusi Korps Bhayangkara untuk terus melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Tiga peran utama ini merupakan bagian dari Tri Brata dan Catur Prasetya yang menjadi pedoman dasar setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas pokoknya.

Mengayomi dan melindungi berarti memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui program-program kemitraan polisi dan masyarakat. Polisi yang humanis dan bersahabat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Implementasi dari ketiga peran ini tidak hanya terlihat dalam tindakan preventif dan penegakan hukum, tetapi juga dalam upaya Polri untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

Gagasan Indonesia Emas 2045 menjadi negara berskala ekonomi besar tentu berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyatnya sekaligus mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan di Indonesia harus terjamin terlebih dahulu.

Keberhasilan menjamin rasa aman membuat Polri berhasil merebut kepercayaan masyarakat melalui langkah reformasi, pendekatan humanis, dan keterbukaan informasi yang dilakukan. Tentu, kepercayaan masyarakat bukan sekadar angka, melainkan hasil nyata dari kerja keras, kedekatan dengan rakyat, dan komitmen untuk terus berbenah menuju masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur. Polri untuk Masyarakat [*]

Redaksi Majalah Tribrata News

menerima kiriman naskah atau tulisan tentang Kepolisian atau ilmu pengetahuan umum maupun artikel lainnya.

E-mail: pensat.divhumas@gmail.com



08 laporan **UTAMA**

**Satya Haprabu,
Totalitas Polri Mendukung Asta Cita**

Bukan hanya soal pangan, tetapi kedaulatan negara. Swasembada akan mengurangi ketergantungan dan menciptakan ketahanan yang sesungguhnya.

20 UNGKAP KASUS

- **BERESKRIM POLRI BONGKAR SINDIKAT BBM OPLOSAN, KERUGIAN NEGARA CAPAI RP 82,5 MILIAR**



**PROF. MR. DJOKOSOETONO;
PELETAK DASAR INTELEKTUALITAS
DI KEPOLISIAN**

32 KABAR JAJARAN

- **PERINGATI HARI BHAYANGKARA, POLDA JAJARAN GELAR BHAKTI SOSIAL**

62 INSPIRATIF

- **PENGABDIAN DI TAPAL BATAS, PERJUANGAN MENYULAM ASA DI TANAH PAPUA**

40 INOVASI

- **SMA KEMALA TARUNA BHAYANGKARA, 119 SISWA DARI 11.000 YANG IKUTI SELEKSI**

78 BUAH BIBIR

- **AKSI HUMANIS KAPOLRES KENDAL JAUHKAN ANAK DARI PENGALAMAN TRAUMATIS**

48 BUNGA RAMPAI

- **INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM TRIBRATA DAN CATUR PRASETYA**



Foto Cover
Presiden Republik Indonesia bersama Kapolri
Sumber: Istimewa



POLRI UNTUK MASYARAKAT

Sambut Hari Bhayangkara ke-79, Kapolri Ziarah dan Tabur Bunga di TMPNU Kalibata

DIVISI HUMAS POLRI

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan selamat menyusul diselesaikannya daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUHAP oleh pemerintah. Kapolri menegaskan bahwa supremasi hukum menjadi harapan rakyat.

“Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada tim yang telah berhasil menyusun rancangan. Kita sangat paham, begitu pelik, begitu sulit. Kita menyadari bahwa supremasi hukum tentunya menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia,” kata Kapolri dalam acara penandatanganan naskah DIM RUU KUHAP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 23 Juni 2025.

DIM RUU KUHAP bisa dituntaskan karena kuatnya sinergitas antarlintas lembaga penegak hukum yang dalam pembahasannya mengedepankan upaya hak bagi para pencari keadilan.



“Kita sebagai penyelenggara, penegakan hukum, harus mampu mempersiapkan dan mengikuti dan bertransformasi apa yang diharapkan oleh para pencari keadilan. Oleh karena itu, tentunya kita semuanya bersyukur bahwa ini bukan karya biasa, tapi karya agung,” kata Kapolri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Car Free Day (CFD) dalam rangkaian peringatan dari HUT ke-79 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Minggu 22 Juni 2025.

Dalam kesempatan tersebut Kapolri memulai jalan sehat bersama pejabat utama (PJU) Mabes Polri dari Silang Monas hingga Bunderan HI. Kapolri juga mengajak masyarakat untuk sarapan bersama, bahkan duduk satu meja.

Kebersamaan Polri dengan masyarakat sesuai dengan tema besar yang diusung pada HUT Bhayangkara yakni Polri Untuk Masyarakat.

Usai sarapan bersama masyarakat, Kapolri yang didampingi Ketua Umum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo kemudian berkunjung ke stan pelayanan kesehatan yang disediakan.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri bersama istri juga membagikan bingkisan kepada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).



Lebih lanjut, Kapolri bersama rombongan kembali untuk melihat pelayanan kepolisian seperti pelayanan SAMSAT Keliling, SKCK Online dan Mobil Dapur Umum.



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerahkan sebanyak 9.648 hewan kurban dari Polri pada Idul Adha 1446 Hijriah. Hewan kurban yang terdiri dari sapi dan kambing itu akan didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan.

“Pada Jumat, 6 Juni 2025, saya atas nama pribadi dan juga Polri menyerahkan hewan kurban sebanyak 6.169 ekor sapi dan 3.479 ekor kambing kepada panitia kurban Mabes Polri,” kata Kapolri di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Juni 2025.

Secara pribadi, Kapolri juga menyumbangkan 432 ekor sapi dengan 40 sapi di antaranya diserahkan ke Mabes Polri dan sisanya didistribusikan ke kepolisian-kepolisian daerah dan sekitarnya di seluruh Indonesia.

Usai pelaksanaan Salat Idul Adha di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Kapolri menyerahkan sapi dengan jenis limosin seberat 1.100 kilogram. Sapi tersebut diterima Ketua Panitia Kurban Polri, Karowatpers SSDM Polri, Brigjen Anwar.



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar silaturahmi dengan siswa terpilih SMA Kemala Taruna Bhayangkara yang merupakan upaya Polri mendukung pendidikan berkualitas di Tanah Air.

“Hari ini kami bisa ikut bergabung untuk mewujudkan apa yang menjadi program Bapak Presiden yaitu bagaimana kita mewujudkan kualitas SDM unggul dan salah satunya melalui bagaimana kita mendorong dan membangun sekolah unggulan,” kata Kapolri di STIK, Jakarta, Minggu 18 Mei 2025.

Pada kesempatan tersebut Kapolri menjelaskan proses seleksi pendaftaran calon siswa SMA Kemala Taruna Bhayangkara diikuti oleh 11.765 calon peserta didik. Seleksi yang ketat itu akhirnya menghasilkan 119 siswa terpilih SMA Kemala Taruna Bhayangkara angkatan pertama.

“Kita akhirnya bisa mendapatkan 119 totalnya awalnya 120. Namun kemudian yang berlanjut 119 menjadi siswa angkatan pertama untuk SMA Kemala Taruna Bhayangkara,” kata Kapolri. [*]



■ Evakuasi Warga Terdampak Banjir



HARI BHAYANGKARA, 79 TAHUN MENGABDI PADA NEGERI

Bersama pasang surut perjalanan bangsa, Korps Bhayangkara senantiasa tampil sebagai garda terdepan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hampir selama delapan dekade terakhir, sejarah pengabdian Polri ditorehkan tinta emas dalam menorehkan mulai dari mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga menjalankan tugas-tugas kemanusiaan.

Satya Haprabu,

Totalitas Polri Mendukung Asta Cita

Bukan hanya soal pangan, tetapi kedaulatan negara. Swasembada akan mengurangi ketergantungan dan menciptakan ketahanan yang sesungguhnya.



Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan komitmennya untuk mendukung program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuju Indonesia Emas 2045.

Dukungan Polri terhadap visi pemerintah menjadi keniscayaan mutlak karena dari delapan visi tersebut sebagian besar bersinggungan dengan tugas pokok Polri yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di sisi lain, Korps Bhayangkara juga secara all out mendukung visi kemandirian bangsa seperti termaktub pada Asta Cita yakni kemandirian bangsa khususnya melalui swasembada pangan khususnya peningkatan produksi jagung.

Jauh-jauh hari komitmen tersebut sudah ditegaskan termasuk pada rapat koordinasi ketahanan pangan di Pusat Kendali Krisis (Pusdalsis), Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari 2025.

Pada rapat yang dipimpin oleh Irwasum Polri selaku Pengawas Gugus Tugas Polri untuk Ketahanan Pangan, Komjen Dedi Prasetyo yang secara virtual diikuti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, para Kapolda, Kapolres, serta perwakilan dari pemerintah daerah seluruh Indonesia.

"Kami siap mengawal dan memastikan program swasembada jagung ini berjalan sesuai target. Ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung kebijakan strategis Presiden dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional," ujar Komjen Dedi Prasetyo dalam sambutannya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam arahannya menjelaskan bahwa ada potensi besar untuk meningkatkan produksi jagung nasional melalui pemanfaatan lahan-lahan non-produktif. Pemerintah menargetkan perluasan lahan tanam jagung hingga mencapai 1,7 juta hektare di berbagai daerah, termasuk lahan kering dan lahan perkebunan.

Dari perluasan lahan tersebut, diharapkan Indonesia dapat menambah produksi jagung sebanyak 4 juta ton. Ini secara massif akan menggenjot ketersediaan jagung nasional hingga 25 persen dibandingkan produksi saat ini.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Polri dalam pelaksanaan program ini. Dengan sinergi lintas sektor, kami optimistis swasembada jagung dapat tercapai pada tahun 2025," kata Amran.



Sebagai bagian dari strategi pengawasan dan koordinasi yang lebih efektif, Polri juga meluncurkan aplikasi berbasis digital bernama Helpdesk Mendukung Ketahanan Pangan. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pendataan lahan, pengajuan dan distribusi bantuan, serta pemantauan perkembangan panen di lapangan.

Komjen Dedi menyebutkan bahwa aplikasi tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat respons terhadap hambatan teknis di lapangan, serta menjamin transparansi dan efisiensi dalam implementasi program.

"Kami ingin memastikan tidak ada kendala yang berlarut di lapangan. Lewat sistem ini, kami bisa bertindak cepat, tepat, dan terukur," ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum untuk membangun sinergi nasional antara Polri, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan terhadap pilar pertama dalam program Asta Cita, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan nasional.





Sejumlah kepala daerah dalam rapat tersebut turut menyampaikan kesiapan wilayah masing-masing dalam menyediakan lahan, tenaga kerja, dan fasilitas penunjang produksi jagung. Mereka mengapresiasi inisiatif Polri dalam membentuk sistem pengawasan terpadu.

Program ini menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor jagung dan memperkuat basis produksi dalam negeri. Dengan adanya sinergi antar lembaga dan dukungan penuh dari institusi kepolisian, pemerintah berharap swasembada jagung bukan hanya menjadi target, tetapi kenyataan yang akan tercapai dalam dua tahun ke depan.

"Ini bukan hanya soal pangan, tetapi soal kedaulatan negara. Jika kita bisa swasembada jagung, maka kita mengurangi ketergantungan dan menciptakan ketahanan yang sesungguhnya," tutup Komjen Dedi.

Peran Strategis

Dalam lanskap ketahanan nasional, sektor pangan dan gizi tidak lagi hanya menjadi urusan kementerian teknis. Korps Bhayangkara juga mengambil bagian penting dalam upaya membangun kedaulatan pangan

dan mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

Tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, Polri kini menjadi salah satu motor penggerak dalam dua agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: swasembada jagung dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bukan sekadar respons taktis, keterlibatan Polri menjadi bagian dari peran strategis mendukung visi pembangunan nasional jangka panjang yang terangkum dalam Asta Cita.

Sementara perubahan iklim, fluktuasi harga pangan global, dan krisis pangan di berbagai belahan dunia menjadi tantangan, Indonesia justru mencatat prestasi penting: lonjakan produksi jagung nasional hingga 48 persen hanya dalam tiga bulan pertama 2025.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada April 2025, hasil survei KSA Jagung Februari 2025 mencatat bahwa produksi jagung tongkol kering panen (JTKP) Indonesia mencapai 9.032.262 ton.





Angka ini menunjukkan kenaikan drastis dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan 6.083.506 ton. Kenaikan sebesar 48,47 persen ini bukan hanya menggembirakan, tapi juga menunjukkan bahwa target swasembada jagung pada akhir 2025 bukan sekadar impian.

Namun, capaian ini tentu bukan hasil kerja satu pihak saja. Di balik angka-angka tersebut, terdapat kerja kolaboratif antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, kelompok tani, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan tentu saja, Polri

yang menggerakkan masyarakat untuk menanam jagung di berbagai daerah, termasuk wilayah yang sebelumnya tidak menjadi sentra produksi utama.

Polri membentuk Gugus Tugas Mendukung Ketahanan Pangan, yang bekerja lintas struktural dari Mabes Polri hingga ke tingkat Polsek. Gugus tugas ini tidak hanya menjalankan pendampingan, tetapi juga mengawal distribusi dan memastikan penyerapan hasil panen oleh Bulog berjalan sesuai harga acuan Rp5.500 per kilogram, sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.

Tantangan Logistik

Dalam rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) terkait ketahanan pangan, Senin, 28 April 2025, Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol. Anwar menyampaikan apresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kerja keras seluruh jajaran Polri dalam mewujudkan swasembada jagung.

"Jika produksi meningkat setiap triwulan dibandingkan tahun sebelumnya, maka target swasembada jagung sangat mungkin kita capai. Ini bukan sekadar angka, tetapi tentang kemandirian bangsa," ujar Irjen Anwar dalam rapat Anev tersebut.

Di sisi lain, keberhasilan produksi juga menimbulkan tantangan baru. Lonjakan hasil panen menyebabkan kapasitas gudang Bulog tidak mencukupi untuk menampung jagung dalam jumlah besar. Situasi ini mendorong Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Polri membantu menyediakan gudang penyimpanan sementara, sekaligus merancang pembangunan gudang jangka panjang di atas tanah milik Polri di berbagai daerah.



"Kami akan bekerja sama dengan Bulog untuk menggunakan gudang-gudang milik Polri. Ini solusi jangka pendek. Untuk jangka panjang, kami akan bangun gudang khusus hasil pertanian," kata Asisten Logistik Kapolri Irjen Pol. Suwondo Nainggolan.

Dengan langkah ini, Polri bukan hanya sebagai penggerak di sektor hulu yakni produksi, namun juga di sektor hilir pada distribusi dan penyimpanan. Pendekatan ini sekaligus menutup rantai logistik pangan nasional secara menyeluruh.

Dari Ladang ke Dapur

Sementara itu, di sisi pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak, Polri juga menjadi pilar penting dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi janji utama Presiden Prabowo.

Salah satu bentuk nyata dukungan Polri terhadap program ini adalah dengan membangun dan mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni dapur umum dengan standar nasional untuk menyalurkan makanan sehat kepada anak-anak sekolah.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan komitmennya untuk membangun sekitar 118 SPPG di seluruh Indonesia. Saat ini, sudah ada 12 SPPG yang beroperasi, 21 dalam proses verifikasi, dan sekitar 60 dalam tahap pembangunan.

Pernyataan ini disampaikan saat peresmian SPPG Polres Jembrana, Bali pada Selasa, 17 Juni 2025. Dapur ini menjadi tambahan penting dari tujuh SPPG lain yang sudah lebih dahulu berjalan.

"SPPG Jembrana melayani 11 sekolah, mulai dari TK hingga SMK, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 3.500 anak. Ini bukan hanya soal makanan, tapi juga soal masa depan generasi kita," tegas Kapolri.

Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit turut meninjau langsung dapur, mengecek kebersihan, proses pengolahan makanan, dan mengevaluasi apakah standar Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar diterapkan.

SPPG bukan hanya tempat memasak, melainkan simbol sinergi lintas sektor yang nyata. Dikelola dengan standar gizi yang ketat, dapur-dapur ini memastikan bahwa anak-anak Indonesia menerima asupan yang bergizi, bersih, dan aman.

Selain sebagai dukungan terhadap pembangunan sumber

daya manusia, SPPG juga mendorong partisipasi lokal: melibatkan ibu-ibu KWT, koperasi lokal, petani sayur, hingga UMKM katering. Langkah ini memperkuat ekosistem ketahanan gizi nasional yang tak hanya bergantung pada negara, tapi juga bertumpu pada kekuatan masyarakat.

Model Kolaborasi Baru

Kehadiran Polri dalam sektor pangan dan gizi menunjukkan wajah baru dari kerja kolaboratif lintas lembaga. Dalam banyak proyek sebelumnya, kerja pemerintah kerap terkotak-kotak dalam struktur vertikal sektoral.





Kini, pendekatan kolaboratif horizontal terlihat makin dominan. Kementan tetap menjadi ujung tombak produksi, Badan Pangan Nasional sebagai regulator dan stabilisator harga, sementara Polri mengambil peran dalam mobilisasi masyarakat, pengamanan distribusi, bahkan penyediaan fasilitas penyimpanan.

“Kita perlu memperluas makna pengamanan. Hari ini, mengamankan pangan sama pentingnya dengan mengamankan wilayah,” ujar Irlen Edy Murbowo dalam wawancara terpisah.

Hal ini diamini oleh berbagai pihak, termasuk akademisi, yang menilai kehadiran Polri dalam pembangunan ketahanan pangan bukan bentuk militerisasi sektor sipil, melainkan bentuk mainstreaming keamanan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Dukungan Presiden dan Harapan ke Depan

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif Polri dalam berbagai program ketahanan nasional. Ia menegaskan

bahwa dalam membangun Indonesia Emas 2045, dibutuhkan sinergi dari seluruh elemen bangsa, termasuk TNI dan Polri.

Kementerian Pertanian menyambut baik peran Polri yang dinilai adaptif, responsif, dan tepat sasaran. Kepala Badan Pangan Nasional juga menyatakan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga tentang ekosistem yang mampu menyerap hasil tani secara adil dan efisien.

Dalam waktu yang relatif singkat, Polri berhasil membuktikan bahwa institusi keamanan dapat memainkan peran kunci di luar tugas tradisionalnya. Dengan menjadi penggerak ketahanan pangan dan gizi, Polri tak hanya mendekatkan diri dengan masyarakat, tetapi juga menjadi katalis dalam membangun kepercayaan publik terhadap negara.

Tahun 2025 baru memasuki pertengahan, namun arah pergerakan menuju swasembada dan kecukupan gizi nasional sudah mulai terbentuk. Dari jagung yang tumbuh di ladang hingga nasi dan sayur yang terhidang di piring anak-anak sekolah, negara kini hadir dalam wujud nyata—dan Polri berada di garis depan pelaksanaannya. [*]



Indikator Kinerja Polri, **KEPUASAN MASYARAKAT MENINGKAT**

Masyarakat mulai merasakan kehadiran negara melalui tindakan nyata, bukan hanya retorika. Meskipun pekerjaan rumah masih banyak, kepercayaan publik menjadi modal penting menciptakan rasa aman di negeri ini.



Meski citra dan kesan terhadap institusi kepolisian di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks. Khitah aparat kepolisian sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat tetap tak bisa dipungkiri.

Kinerja baik Polri terkonfirmasi hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi yang sekaligus menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Korps Bhayangkara dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Meski angka kepuasan cukup tinggi, Polri tetap menghadapi tantangan yang tidak kecil. Salah satunya adalah persepsi publik terhadap penegakan hukum yang tegas namun adil.

Selain itu, tantangan struktural seperti keterbatasan personel, wilayah hukum yang luas menjadi perhatian tersendiri.

Terus membaiknya citra Korps Bhayangkara tentu tak lepas dari kerja keras dan upaya sungguh-sungguh seluruh personel Polri meningkatkan kinerja dan

semangat pengabdian untuk melayani masyarakat.

Berbagai capaian keberhasilan Polri sepanjang tahun 2024 di antaranya penyelamatan 1.794 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), menuntaskan 12.374 kasus dari 23.699 perkara kejahatan terhadap perempuan dan anak, menyelesaikan 36.174 dari total 42.824 pengungkapan perkara narkoba dan menyita barang bukti berbagai jenis narkoba senilai Rp 8,6 triliun.



Sementara pada pengungkapan kasus korupsi, Polri menyelesaikan 431 dari 1.280 kasus dan menjerat 830 orang sebagai tersangka serta berhasil melakukan *asset recovery* senilai hingga Rp 887 miliar.

Pada kasus perjudian Polri melakukan penegakan hukum terhadap 4.926 perkara 3.526 perkara diantaranya berhasil dituntaskan termasuk 1.611 judi online yang melibatkan 1.918 tersangka yang berperan sebagai bandar, admin, operator,

telemarketing, *endorse*, pengepul, hingga pemain.

Untuk perkara perjudian, Polri juga menerapkan sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan telah menyita barang bukti mulai dari aset bangunan hingga uang tunai senilai puluhan miliar serta memblokir 126.447 situs judi online.

Sepanjang tahun itu, Polri juga berhasil *handing over* atau penjemputan dan pemulangan terhadap 10 buronan Indonesia

berstatus *high profile*, menindak 2 juta lebih pelanggaran lalu lintas, serta bersinergi dengan TNI untuk menyelamatkan pilot Susi Air di Papua.

Sepanjang tahun 2024, Polri juga menegaskan komitmennya melakukan perbaikan internal dengan menindak ribuan personel yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.

Sementara itu, tahun 2025 pencapain Polri dibuktikan suksesnya pengamanan musim

Sepanjang tahun 2024, Polri juga menegaskan komitmennya melakukan perbaikan internal dengan menindak ribuan personel yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik





liburan Tahun Baru 2025 dan PAM arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 melalui Operasi Ketupat 2025.

Terus Membaik

Capain lain yang juga mendorong kepuasan publik terhadap citra Polri juga dibuktikan melalui operasi pemberantasan premanisme. Meski dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan kasus kriminal secara umum, praktik premanisme tetap menjadi masalah serius, terutama di daerah-daerah padat penduduk dan pusat ekonomi.

Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari pungutan liar terhadap pedagang pasar, pemalakan sopir truk, hingga penguasaan lahan atau parkir ilegal.

Tak jarang, aksi premanisme menimbulkan rasa takut dan menghambat aktivitas ekonomi warga, terutama kelompok rentan seperti pedagang kecil, pengemudi ojek, dan pekerja informal. Oleh sebab itu, pemberantasan premanisme bukan semata persoalan hukum, tetapi juga soal perlindungan sosial dan keadilan ekonomi. Dalam konteks inilah, peran Polri menjadi vital. Bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga rasa aman masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Mei 2025, mayoritas masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja kepolisian dalam penanganan kejahatan premanisme yang kerap meresahkan ruang publik.

Pada survei yang dilakukan pada 17–20 Mei 2025 tercatat, 67,4 persen responden merasa puas, terdiri dari 59,3 persen cukup puas dan 8,1 persen sangat puas. Sebaliknya, hanya 12,1 persen yang merasa kurang puas, dan 2,1 persen tidak puas sama sekali. Sementara 18,3 persen lainnya tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.

Survei tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang cukup tinggi terhadap langkah konkret yang diambil Polri dalam

memerangi tindak kriminal yang acap kali mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sehari-hari.

Arah yang Benar

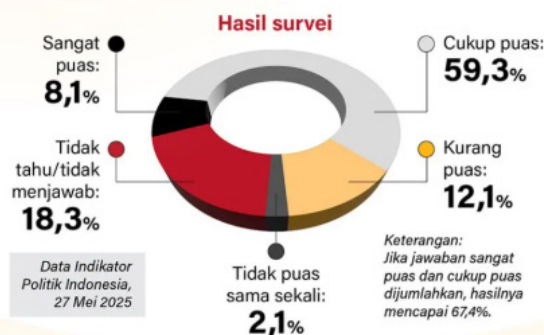
Sementara itu, data resmi dari Mabes Polri menunjukkan bahwa selama 1–14 Mei 2025, pihak kepolisian telah menangani setidaknya 2.028 kasus premanisme. Dari jumlah itu, terdapat 331 kasus terkait perampasan dan 1.697 kasus yang melibatkan senjata tajam.

Angka ini menunjukkan intensitas tinggi tindak kriminal yang melibatkan unsur premanisme, sekaligus menegaskan skala tantangan yang dihadapi aparat dalam menjaga ketertiban umum.

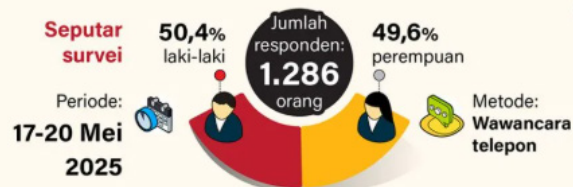
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pernyataannya menegaskan bahwa Polri tidak akan berkompromi terhadap praktik-praktik premanisme, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terorganisasi.

Survei kepuasan terhadap pemberantasan premanisme

Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Mei 2025 menunjukkan mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja kepolisian terkait pemberantasan premanisme. Kepuasan itu tak lepas dari beragam upaya Polri dalam menindak kejahatan tersebut.



Aspek penilaian dalam survei



Toleransi kesalahan/margin of error: $\pm 2,8\%$

Upaya Polri memberantas premanisme



Melakukan penyelidikan terhadap kasus premanisme yang dilaporkan masyarakat.



Menggelar patroli/operasi di tempat umum, seperti terminal, pasar, pelabuhan dan jalanan.



Menangkap dan menindak pelaku/oknum yang terlibat premanisme sesuai aturan hukum.



Melakukan sosialisasi kepada organisasi masyarakat dan masyarakat umum agar tidak melakukan aksi premanisme dan melaporkannya jika mengetahui hal tersebut

“Pemerintah tidak ingin premanisme ini membuat aktivitas masyarakat menjadi resah. Kita tidak kompromi. **Siapa pun itu, dari kelompok manapun, tetap kami tindak tegas,**”



Masyarakat Puas Kinerja Polri Berantas Premanisme

- Survei Indikator Politik Indonesia (Mei 2025) mengungkap mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dalam menangani premanisme
- Sebanyak 67% masyarakat puas terkait pemberantasan premanisme
- Polri berkomitmen untuk terus memperkuat upaya dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat

"Pemerintah tidak ingin premanisme ini membuat aktivitas masyarakat menjadi resah. Kita tidak kompromi. Siapapun itu, dari kelompok manapun, tetap kami tindak tegas," kata Jenderal Sigit.

Tren positif dari hasil survei ini memberikan sinyal bahwa arah kebijakan Polri dalam menangani premanisme berada di jalur yang tepat. Diperlukan kesinambungan komitmen, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kerja sama lintas sektor untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh.

Dalam jangka panjang, pemberantasan premanisme harus diiringi dengan pemberdayaan

masyarakat, termasuk membuka lebih banyak lapangan kerja formal dan pelatihan kewirausahaan bagi kelompok yang rentan terjerat dalam jaringan premanisme.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia memberikan validasi terhadap upaya Polri dalam menindak premanisme. Masyarakat mulai merasakan kehadiran negara melalui tindakan nyata, bukan hanya retorika. Meskipun pekerjaan rumah masih banyak, satu hal kini menjadi jelas: publik mulai percaya, dan itu adalah modal penting dalam menciptakan rasa aman di negeri ini. [*]



BERESKRIM POLRI

BONGKAR SINDIKAT BBM OPLOSAN,

KERUGIAN NEGARA CAPAI RP 82,5 MILIAR

Tersangka membeli BBM bersubsidi dari SPBU menggunakan aplikasi MyPertamina yang dimanipulasi.

Satuan Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri kembali mengungkap kejahatan berskala besar dalam sektor energi. Dalam rentang waktu beberapa pekan terakhir aparat berhasil membongkar sindikat penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis bio-solar di empat wilayah strategis Indonesia yakni Bogor, Banjarmasin, Karawang, dan Sukoharjo.

Dari operasi tersebut, sepuluh pelaku ditangkap dengan inisial S, MM, AM, AS, H, WTC, DBY, SY, SP,

dan LA. "Ini kasus penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi di lokasi yang berbeda-beda," ungkap Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Rabu, 11 Juni 2025.

Truk Modifikasi dan Barcode Palsu

Pengungkapan paling menonjol terjadi di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sana, dua pelaku berinisial MM dan AM membeli BBM jenis bio solar dari



sejumlah SPBU menggunakan truk yang sudah dimodifikasi tangkinya.

Solar tersebut kemudian dipindahkan ke dalam drum di gudang sebelum dimasukkan kembali ke truk tangki biru berkapasitas 5.000 liter untuk dijual ke pasar gelap.

Menurut Brigjen Nunung, modus para pelaku memanfaatkan barcode dari aplikasi MyPertamina yang telah dimanipulasi yang memungkinkan mereka melakukan pembelian solar bersubsidi secara berulang tanpa pengawasan ketat.

"Mereka membeli dengan barcode tidak sesuai dan aktivitas ini sudah dilakukan selama lebih dari satu tahun," kata Brigjen Nunung.

Dari lokasi ini, polisi menyita 12 unit truk pengangkut bio solar serta lebih dari 20.000 liter BBM. Total kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp82,5 miliar.

Sementara itu, di Karawang, Jawa Barat, pola penyimpangan dengan modus hampir serupa dilakukan dua berinisial AS dan H yang juga terlibat dalam penyalahgunaan solar subsidi.

AS berperan sebagai koordinator gudang, sedangkan H merupakan sopir truk yang bertugas membeli dan mengangkut BBM dari SPBU. "AS menjadi otak distribusi BBM ilegal ini, sementara H melakukan pembelian dan pengangkutan," jelas Brigjen Nunung.



Dalam pengeledahan, ditemukan pula bukti dokumen manipulasi *barcode* dan catatan transaksi penjualan BBM ilegal. Aksi para tersangka di Karawang tersebut menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp2 miliar.

Penyelidikan lebih lanjut juga dilakukan di wilayah Sukoharjo (Jawa Tengah) dan Bogor (Jawa Barat), yang disebut sebagai titik penting dalam rantai distribusi BBM

oplosan. Dalam kasus ini, para pelaku menciptakan jalur transportasi khusus dari SPBU hingga lokasi penyimpanan dan pengecer di luar kota.

“Ada struktur bisnis ilegal yang sistematis dan terorganisir. Ini bukan tindakan individu, tapi kerja jaringan,” ujar Nunung.

Ia menambahkan, pengungkapan jaringan ini tidak lepas dari kerja sama masyarakat, pengawasan SPBU, dan penelusuran digital.

“Ada struktur bisnis ilegal yang sistematis dan terorganisir. Ini bukan tindakan individu, tapi kerja jaringan,”





Salah satu poin penting dalam pengungkapan ini adalah penyalahgunaan aplikasi MyPertamina. *Barcode* pembelian BBM yang seharusnya digunakan oleh konsumen resmi dimanipulasi untuk pembelian dalam jumlah besar oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Berdasarkan aturan Pertamina, setiap transaksi BBM bersubsidi kini harus dicatat secara digital. Namun, dalam kasus ini para pelaku berhasil mengecoh sistem

dengan menggunakan *barcode* hasil kloning.

Kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi seperti ini memiliki dampak domino terhadap perekonomian nasional. Subsidi BBM diberikan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat menengah ke bawah. Namun, ketika subsidi ini justru dimanfaatkan oleh jaringan kriminal, maka kelompok rentan yang seharusnya menerima bantuan menjadi korban.

Atas perbuatannya, kesepuluh pelaku dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Ancaman hukuman yang dikenakan adalah penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp 60 miliar. [*]

Polisi Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster, Nilai Kerugian Negara Tembus Rp 9,7 Miliar



Penyelundupan benih bening lobster tak hanya berdampak terhadap ekosistem laut, namun berdampak serius pada penerimaan negara, kedaulatan, dan pengelolaan perikanan.

Kepolisian Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian sumber daya laut nasional. Dalam dua operasi berbeda, aparat berhasil menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) yang ditaksir merugikan negara hampir Rp 10 miliar.

Pengungkapan pertama dilakukan oleh Direktorat Polair Korpolaairud Baharkam Polri di Sukabumi, Jawa Barat, pada Minggu dini hari, 15 Juni 2025.

Dalam operasi tersebut, petugas menghentikan sebuah mobil Toyota Calya dan menemukan dua boks sterofoam berisi 11.543 ekor benih lobster yang hendak diselundupkan ke luar negeri.

"Dalam pemeriksaan, ditemukan bahwa benih lobster itu tidak dilengkapi dokumen resmi dari dinas terkait," jelas Dirpolair Baharkam Polri, Brigjen Pol Idil Tabransyah, pada konferensi pers, Selasa 17 Juni 2025.

Dua pria yang diduga sebagai kurir, masing-masing PN asal Lebak dan HM asal Cianjur, langsung ditangkap. Dari hasil pemeriksaan awal, mereka mengangkut lobster

atas perintah pihak lain yang masih dalam pengejaran polisi. Nilai kerugian negara dari penyelundupan ini ditaksir mencapai Rp 461 juta.

Barang bukti yang diamankan antara lain satu unit mobil Toyota Calya, dua boks sterofoam, satu STNK, dan satu ponsel Oppo A54. Ribuan benih lobster tersebut telah dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya di perairan Banten.

Kepolisian menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan akan terus diperkuat, mengingat dampak besar praktik ilegal seperti penyelundupan benih lobster terhadap ekosistem laut dan potensi ekonomi bangsa.

"Ini bukan hanya soal kerugian material, tetapi juga ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya laut Indonesia," tegas Brigjen Idil.

Kepolisian menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan akan terus diperkuat, mengingat dampak besar praktik ilegal seperti penyelundupan benih lobster terhadap ekosistem laut dan potensi ekonomi bangsa. Brigjen Idil menyebutkan bahwa sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bea

Cukai, dan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan untuk mencegah kejahatan serupa.

Disamarkan

Sementara itu, pengungkapan lebih besar dilakukan oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada 31 Mei 2025. Dalam operasi yang berlangsung di kawasan kargo Bandara Soetta, Tangerang, aparat menggagalkan penyelundupan 171.880 ekor benih lobster jenis pasir dan mutiara senilai Rp 9,2 miliar.

Kapolresta Bandara Soetta, Kombes Pol Ronald FC Sipayung, mengungkapkan bahwa benih lobster dikemas dalam plastik beroksigen, dimasukkan ke koper, lalu disamarkan lagi dengan kardus dan kain sebelum dikirim ke Batam melalui terminal kargo. Barang itu rencananya akan diteruskan ke luar negeri.

"Pengungkapan ini berawal dari informasi adanya pengiriman mencurigakan melalui Gudang Bangun Desa Logistindo (BDL)," ujarnya dalam keterangan resmi 11 Juni 2025.

Dalam kasus ini, tujuh tersangka ditangkap dengan



inisial RK, AH, JS, DS, RS, AN, dan WW. Mereka memiliki peran berbeda-beda: RK sebagai petugas keamanan yang meloloskan barang, AH sebagai koordinator pengiriman, JS sebagai petugas X-ray yang mengizinkan barang lolos, dan DS sebagai pengurus dokumen pengiriman. RS dan AN bertugas mengemas benih lobster, sementara WW memerintahkan pengaturan jalur penyelundupan.

"RK menerima imbalan Rp 4 juta per koper, sementara AH mendapat Rp 1 juta per koper untuk pengantaran," kata Ronald.

Modus ini terungkap setelah aparat melakukan pengawasan ketat terhadap jalur-jalur logistik dan penerbangan, terutama dari dan menuju daerah rawan penyelundupan seperti Batam dan Sumatra.

Para pelaku dari kedua kasus dijerat dengan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja, serta Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan kejahatan. Sementara tersangka di Bandara Soetta juga dikenakan Pasal 88 UU Perikanan dan Pasal 87 jo

Pasal 34 UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Regulasi yang Rumit

Selama ini para ahli menyoroti akar permasalahan dari maraknya penyelundupan benih lobster. Salah satunya adalah implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 07/PERMEN-KP/2024 yang dinilai belum berjalan optimal.

Permen tersebut sejatinya memperbolehkan pengeluaran BBL dari wilayah Indonesia melalui skema joint venture antara



Bocah 7 Tahun

Korban Kekerasan Ayah Kandung

Korban mengaku disiksa orang tuanya di Surabaya lalu dibawa ke Jakarta dengan menaiki kereta api.



Nasib tragis menimpa seorang bocah perempuan berusia tujuh tahun berinisial MK. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh kecilnya penuh luka, wajahnya pucat, dan sorot matanya menyiratkan rasa takut yang mendalam. Ia terbaring lemah di atas selembarnya kardus di lorong sempit Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Penemuan MK terjadi pada Rabu pagi, 11 Juni 2025, oleh warga sekitar. Awalnya, keberadaan bocah itu dianggap sebagai pemandangan biasa—anak kecil yang mungkin tidur di pasar karena bermain terlalu larut. Namun, kecurigaan mulai tumbuh ketika bocah itu tak juga bergerak meski suasana pasar mulai ramai.

"Dia tidak bangun-bangun, tergeletak saja di atas kardus," kata Asep (40), seorang pemilik kios optik di pasar tersebut. Asep lah yang kemudian melaporkan temuan itu ke petugas Satpol PP yang tengah berpatroli. MK segera dievakuasi dari tempat gelap yang bahkan nyaris tak tersentuh cahaya matahari.

Saat ditemukan, kondisi MK sungguh memprihatinkan. Tubuhnya sangat kurus dan terlihat lemah. Sejumlah luka terlihat jelas di tangan, kaki, dan punggungnya dengan beberapa bahkan diduga bekas benda tumpul. Ia juga dalam kondisi kelaparan.

Yang lebih memilukan, dari pengakuan MK kepada warga dan aparat, kekerasan itu dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. "Dia bilang, 'nggak mau pulang, bapak saya jahat, saya mau ikut Om aja,'" kata Asep.

Berdasarkan pengakuannya. MK disiksa orangtuanya dan dibawa ke Jakarta dengan menaiki kereta api. Bocah tersebut tengah dalam perawatan intensif di RS Polri Kramat Jati, setelah sebelumnya sempat dirawat di RSUD Kebayoran Lama.



Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, menyatakan bahwa MK menjalani operasi ortopedi akibat tulang lengannya yang patah dan menonjol keluar.

"Alhamdulillah kondisi anak membaik. Namun, ia masih dalam pemulihan intensif dan membutuhkan dukungan psikososial," ujar Brigjen Nurul, Senin 16 Juni 2025.

Tim medis yang menangani MK terdiri dari enam dokter spesialis. Hingga saat ini, belum ada satu pun anggota keluarga yang datang menjenguk, memperkuat dugaan bahwa MK memang telah lama ditelantarkan.

Jejak Keluarga

Selain memprioritaskan pemulihan MK, penyidik dari Bareskrim Polri kini tengah melacak identitas keluarga bocah tersebut. MK sempat menyebut sejumlah nama dan tempat asal seperti Desa Keraton di Surabaya dan wilayah di Klaten, Jawa Tengah. Informasi ini menjadi petunjuk awal bagi polisi dalam menelusuri latar belakang dan asal usulnya.

"Kami sedang melakukan pelacakan ke beberapa wilayah yang disebut oleh anak, termasuk Klaten dan Surabaya," jelas Brigjen Nurul.

Namun, hingga kini data yang didapat dari lapangan belum cocok dengan keterangan yang disampaikan MK. Proses

identifikasi terus dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Polisi meyakini bahwa mengungkap identitas keluarga adalah langkah penting untuk mengusut tuntas siapa pelaku peniksaan terhadap MK.

Sambil menunggu hasil penyelidikan, MK kini berada di bawah pengawasan dan perlindungan Polri bersama sejumlah pemangku kepentingan. Tim pendamping psikologis dan sosial mulai mendampingi MK dalam proses pemulihan fisik dan trauma psikologis. "Perlindungan terhadap korban adalah prioritas utama kami," tegas Nurul.

Ia juga mengajak masyarakat luas untuk turut berperan dalam memberikan lingkungan aman bagi





• anak-anak, serta melaporkan bila menemukan kasus serupa.

• Dikawal KPAI

• Peristiwa penelantaran bocah perempuan berusia tujuh tahun berinisial MK di lorong sempit Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengundang perhatian berbagai pihak. Salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang langsung turun tangan memantau kondisi korban.

“Kami sangat mengapresiasi tindakan para petugas Satpol PP yang dengan sigap membawa anak ini ke rumah sakit dan langsung berkoordinasi dengan kepolisian. Kita doakan bersama, semoga anak ini segera pulih sepenuhnya setelah mendapat penanganan di RS Polri, Kramat Jati,”

• “Kami sangat prihatin atas kejadian ini. Apalagi, berdasarkan pemeriksaan sementara dari Bareskrim Polri, kondisi anak tersebut sangat memprihatinkan—lemah, kurus, dan terdapat sejumlah bekas luka serta luka bakar,” ujar Komisioner KPAI, Kawiyan, dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Juni 2025.

• Kawiyan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi langsung dengan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Direktorat Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri. Ia turut mendampingi tim gabungan saat melakukan penelusuran dan pengumpulan data di lokasi tempat MK ditemukan.

• “Saya, sebagai komisioner yang membidangi Sub Klaster Anak Korban Pengasuhan Salah dan Penelantaran, pada Kamis (12/6) siang ikut langsung bersama tim dari Subdit Anak Bareskrim mengumpulkan informasi dari para saksi di sekitar lokasi,” ujarnya.

Selain itu, KPAI juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat aparat Satpol PP yang segera mengevakuasi MK dari lokasi dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Tindakan cepat itu dinilai sebagai langkah penting untuk menyelamatkan anak dari kondisi yang lebih buruk.

• “Kami sangat mengapresiasi tindakan para petugas Satpol PP yang dengan sigap membawa anak ini ke rumah sakit dan langsung berkoordinasi dengan kepolisian. Kita doakan bersama, semoga anak ini segera pulih sepenuhnya setelah mendapat penanganan di RS Polri, Kramat Jati,” tambah Kawiyan.[*]



PERINGATI HARI BHAYANGKARA, **Polda Jajaran** **Gelar Bhakti Sosial**



Memperingati Hari Bhayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025, jajaran Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat menggelar pengobatan gratis dan bakti sosial bagi 244 penyandang disabilitas, khususnya tunanetra dan tunadaksa.

Dilaksanakan di lahan pertanian Desa Cikole, Lembang, Bandung Barat acara tersebut dihadiri jajaran Polda Jabar, unsur Forkopimda, serta stakeholder terkait.

Selain layanan kesehatan, Polda Jabar juga menyalurkan bantuan sosial berupa 1.400 paket sembako dan 100 kacamata. Selain itu juga alat bantu kesehatan seperti ankle foot orthosis (AFO) bagi penyandang disabilitas.

Kapolda Jabar, Irjen Pol. Rudi Setiawan menyebutkan, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen Polri untuk hadir secara humanis dan berdampak langsung bagi masyarakat. "Kegiatan ini adalah bentuk nyata Polri yang tidak hanya mengayomi, tetapi juga peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas dan para petani," ujar Irjen Rudi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, menjelaskan bahwa kegiatan bakti kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara ini digelar selama 1 hingga 16 Juni 2025. Termasuk di antaranya yakni menyelenggarakan berbagai layanan seperti pengobatan umum, pemeriksaan gigi, konsultasi spesialis, hingga donor darah.

"Total penerima manfaat dari kegiatan ini sudah mencapai lebih dari 4.000 orang, jauh melebihi target yang ditetapkan Mabes Polri," kata Kombes Hendra.



“Total penerima manfaat dari kegiatan ini sudah mencapai lebih dari 4.000 orang, jauh melebihi target yang ditetapkan Mabes Polri,”

Ditambahkan oleh Kabid Humas, kegiatan sekaligus menjadi sarana edukasi kesehatan dan deteksi dini berbagai penyakit, terutama bagi kelompok rentan seperti petani dan penyandang disabilitas. "Kami ingin menjaga kesehatan para petani agar tetap produktif. Mereka adalah pahlawan pangan bangsa yang harus kita perhatikan kesejahteraannya," kata Kombes Hendra.

Tak hanya di Jawa Barat, kegiatan bakti sosial juga dilaksanakan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menyalurkan 300 paket sembako dan melakukan bakti religi di tempat ibadah lintas agama, Selasa, 24 Juni 2025.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, S.I.K., menyampaikan bahwa sebanyak 200 paket sembako telah disalurkan oleh personel Rolog Polda DIY kepada Panti Asuhan Sayap Ibu, Yayasan Saud Al Idris, dan Yayasan Al Maun Bina Akhlak Mulia.

"Sementara 100 paket sembako lainnya disalurkan oleh personel Ditsamapta Polda DIY ke Panti Asuhan Al-Wahhab Sinar Melati dan Yayasan "STAK" Yogyakarta," kata Kabid Humas.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa penyaluran ini dilakukan secara langsung oleh personel di masing-masing lokasi dengan disambut antusias oleh pengurus dan anak-anak panti.

"Kedatangan personel Polda DIY datang membawa bantuan ke Panti Asuhan maupun Yayasan disambut dengan hangat, terlihat dari raut bahagia yang tampak jelas di wajah anak-anak," kata dia.

Polda DIY juga mengadakan bakti religi dengan membersihkan dua tempat ibadah, yaitu Masjid Babussalam dan Gereja Kristen Nazarene (GKN) Gloria Maguwoharjo yang dilakukan oleh personel SPKT Polda DIY.



"Pengamanan yang optimal dalam kegiatan seperti ini menunjukkan komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat dengan pendekatan yang humanis dan proaktif. Situasi selama pelaksanaan kegiatan terpantau aman, tertib, dan kondusif,"



“Dalam kegiatan ini tentunya melibatkan personel Polda DIY bersama pengurus dan masyarakat sekitar sebagai simbol toleransi dan kerukunan antarumat beragama,” ujarnya.

Sementara itu, di Jakarta, Ditpamobvit Polda Metro Jaya mengerahkan puluhan personel untuk mengamankan kegiatan Bakti Sosial dalam rangka HUT Bhayangkara ke-79 di kawasan CFD, Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu 22 Juni 2025.

Dalam momen ini, personel Ditpamobvit yang terdiri atas para Srikandi Polwan juga memberikan bunga mawar kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Umum Bhayangkari sebagai bentuk sambutan hangat atas kehadiran mereka dalam kegiatan bakti sosial tersebut.

Suasana berlangsung meriah dan tertib. Masyarakat tampak antusias berinteraksi dan berfoto bersama personel Ditpamobvit yang bertugas.



“Pengamanan yang optimal dalam kegiatan seperti ini menunjukkan komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat dengan pendekatan yang humanis dan proaktif. Situasi selama pelaksanaan kegiatan terpantau aman, tertib, dan kondusif,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi.

Suasana berlangsung meriah dan tertib dengan masyarakat tampak antusias berinteraksi dan berfoto bersama personel Ditpamobvit yang bertugas. [*]



Hanya 2 x24 Jam,
Polda Bali
Ungkap
Kasus Penembakan WNA





**SAAT INI SUDAH DIAMANKAN TIGA
TERSANGKA DAN BEBERAPA BARANG
BUKTI YANG DIDUGA DIPAKAI UNTUK
MELAKUKAN PERBUATAN PENEMBAKAN
TERSEBUT, ||**



Hanya dalam kurun waktu 2 x24 jam, Polda Bali berhasil mengungkap kasus penembakan yang menewaskan seorang warga negara Australia, ZR (32), dan melukai rekannya, SG (34).

Insiden tersebut terjadi pada 14 Juni 2025 di sebuah vila di kawasan Mungu, Badung, Bali, dan melibatkan tiga tersangka utama yang kini telah diamankan oleh pihak kepolisian.

Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya S.H., S.I.K., M.Si., dalam konferensi pers menjelaskan bahwa ketiga tersangka yang ditangkap adalah JDF (37), PMT (37), dan MC (23) yang juga merupakan warga negara Australia.

"Saat ini sudah diamankan tiga tersangka dan beberapa barang bukti yang diduga dipakai untuk melakukan perbuatan penembakan tersebut," kata Kapolda Bali Irjen Pol Daniel.

Penangkapan ketiga tersangka tersebut merupakan hasil koordinasi antara Polda Bali, Polres Badung, Bid Labfor, Dittipidum Bareskrim, Divhubinter Polri, NCB Interpol, serta Ditjen Imigrasi.

Pengungkapan kasus penembakan ini dilakukan dengan melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan para saksi serta memeriksa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

Kapolda menjelaskan bahwa para pelaku ditangkap di tempat yang berbeda. Tersangka JDF ditangkap di Jakarta pada Senin, 16 Juni 2025 saat hendak kabur ke luar negeri.

Sebelumnya ia diamankan oleh Ditjen Imigrasi setelah gagal melintas keluar Indonesia karena lampu pada autogate mobil yang dikendarainya menunjukkan warna merah yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan termasuk dalam daftar cekal

imigrasi. Sementara itu, pelaku PMT dan MC ditangkap di Bandara Changi, Singapura, pada Selasa 17 Juni 2025.

Menurut hasil penyelidikan, ketiga pelaku mulanya melarikan diri menggunakan tiga buah sepeda motor sesaat setelah melakukan penembakan. Mereka melanjutkan upaya pelariannya dengan menggunakan mobil Fortuner dengan nomor polisi DK1537ABB dan Suzuki XL-7 dengan nomor polisi DK1339 FBL menuju Jakarta

untuk selanjutnya kabur ke luar negeri melalui bandara Soekarno-Hatta.

"Dari hasil penelusuran, mobil Toyota Fortuner diamankan petugas di wilayah Tabanan Bali dan mobil XL-7 diamankan petugas di wilayah Bungurasih, Sidoarjo, Jawa Timur," kata Kapolda Bali Irjen Pol Daniel.

Baik mobil ataupun motor yang digunakan pelaku selanjutnya diamankan untuk menjadi barang bukti. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa





17 selongsong peluru, 2 proyektil utuh, 55 pecahan proyektil, peluru berukuran 9 milimeter, palugada, tas, sejumlah uang mata asing, paspor dan foto korban.

Belakangan diketahui bahwa ZR yang merupakan korban tewas penembakan ini sedang berlibur dengan istrinya, GJ, untuk merayakan ulang tahun GJ sekaligus berbulan madu di Bali. Di Bali, keduanya disambut oleh kakak kandungnya berinisial DJ dan calon iparnya berinisial SG yang merupakan korban luka tembak.

Insiden penembakan ini terjadi sesaat setelah mereka kembali ke vila. Vila yang mereka tinggali tersebut disusupi para pelaku yang langsung disusul tembakan kepada ZR dan SG.

Insiden penembakan ini disaksikan langsung oleh saksi berinisial GJ yang merupakan istri dari korban ZR, dan DN yang merupakan istri dari korban SG.

Kapolda Bali Irjen Pol Daniel menjelaskan bahwa kasus ini masih dalam proses penyidikan terkait motif para pelaku melakukan aksi penembakan tersebut.

"Kami masih dalam tentunya ini menyangkut motif ya. Kami masih melakukan pemeriksaan dari tadi malam sampai hari ini kami masih terus crosscheck dan pemeriksaan terus dilakukan," katanya.

Para pelaku terancam dijerat Pasal berlapis, yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 ayat (3) dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. [*]

SMA KEMALA TARUNA BHAYANGKARA, 119 SISWA DARI 11.000 YANG IKUTI SELEKSI

Rekrutmen siswa dilakukan melalui proses seleksi ketat meliputi tes potensi akademik, mata pelajaran inti seperti IPA, Matematika, Bahasa Inggris, hingga tes kesehatan, psikologi, dan jasmani.





Dari 11.000 siswa yang mengikuti seleksi, hanya 119 orang yang secara resmi menjadi siswa angkatan pertama SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB). Seleksi ketat agar memenuhi standar sekolah unggulan ditempuh untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Hal tersebut dinyatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berkesempatan menghadiri 'Silaturahmi Siswa Terpilih SMA Kemala Taruna Bhayangkara TA 2025/2026' di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan, Minggu 18 Mei 2025.

"Alhamdulillah terima kasih hari ini kami bisa ikut bergabung untuk mewujudkan apa yang menjadi program Bapak Presiden yaitu bagaimana kita mewujudkan kualitas SDM unggul dan salah satunya melalui bagaimana kita mendorong dan membangun sekolah unggulan," kata Kapolri.

Rekrutmen siswa dilakukan melalui proses seleksi ketat meliputi tes potensi akademik, mata pelajaran inti seperti IPA, Matematika, Bahasa Inggris, hingga tes kesehatan, psikologi, dan jasmani. Seleksi dilakukan dengan prinsip Need

Blind Admission, yang berarti kemampuan finansial calon siswa tidak menjadi pertimbangan karena semua siswa yang diterima akan mendapatkan beasiswa penuh.

Kapolri menyebut pembelajaran di SMA KTB dirancang dengan program beasiswa. Seleksi ketat dan transparan membuktikan siswa terpilih benar-benar berasal dari anak terbaik bangsa.

"Sekolah ini adalah sekolah yang dirancang dengan program beasiswa. Dan perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa dalam proses pemilihannya ataupun penerimaannya, saya sebagai Kapolri pun tidak memiliki hak untuk mengintervensi," jelas Kapolri.

"Artinya yang terpilih ini semuanya adalah karena hasil sendiri dan terpilih dari anak-anak terbaik bangsa Indonesia. Karena ini memang diselenggarakan testnya hampir di 38 Provinsi."

Jenderal Listyo Sigit berharap, gelombang pertama SMA KTB benar-benar siswa yang dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin masa depan karena mereka berada di usia puncak bonus demografi di 2045.

"Kita harapkan mereka adalah aktor-aktor utama penggerak-penggerak utama sebagai penggerak dalam mewujudkan Indonesia emas dan mereka adalah pemimpin-pemimpin di depan," kata Jenderal Listyo Sigit.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto dengan perhatian besar dan prioritas pada pendidikan menyiapkan 20 SMA unggulan pertama dan salah satunya adalah SMA Kemala Taruna Bhayangkara.

Pembangunan sekolah ini menjadi bentuk dan komitmen Korps Bhayangkara berperan aktif mempersiapkan sumber daya manusia dari awal.

Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas 13,5 hektar di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan berbagai fasilitas pendidikan dan penunjang kegiatan siswa yang lengkap, mulai dari ruang kelas modern, perpustakaan, dormitori, hingga GOR, kolam renang, dan lapangan panahan.





Dukungan fasilitas terbaik diperlukan untuk memastikan siswa mendapatkan pendidikan yang holistik berbasis nilai kebhayangkaraan.

SMA Kemala Taruna Bhayangkara dibangun atas kolaborasi tiga yayasan besar yaitu Yayasan Kemala Bhayangkari, Yayasan Pendidikan Kemala Taruna Bhayangkara, dan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia.

Tahun ajaran pertama akan dilaksanakan di Global Darussalam Academy, Yogyakarta, hingga gedung utama di Gunung Sindur rampung. Hal ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar bisa segera dimulai tanpa harus

menunggu pembangunan fisik selesai. Untuk tahun pertama pendidikan, seluruh siswa akan belajar di Global Darussalam Academy yang berlokasi di Kaliurang, Yogyakarta.

SMA Kemala Taruna Bhayangkara terwujud dari kerja sama tiga komponen yakni Yayasan Kemala Bhayangkari selaku pemilik lahan, Yayasan Taruna Bhayangkara bertindak sebagai pengurus perizinan serta Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI) sebagai partner operasional. Kerjasama menjadi jembatan untuk mengakomodasi siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

Sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagian besar dari siswa-siswa yang mengikuti pendidikan di SMA Kemala Taruna Bhayangkara akan mendapat beasiswa sampai lulus.

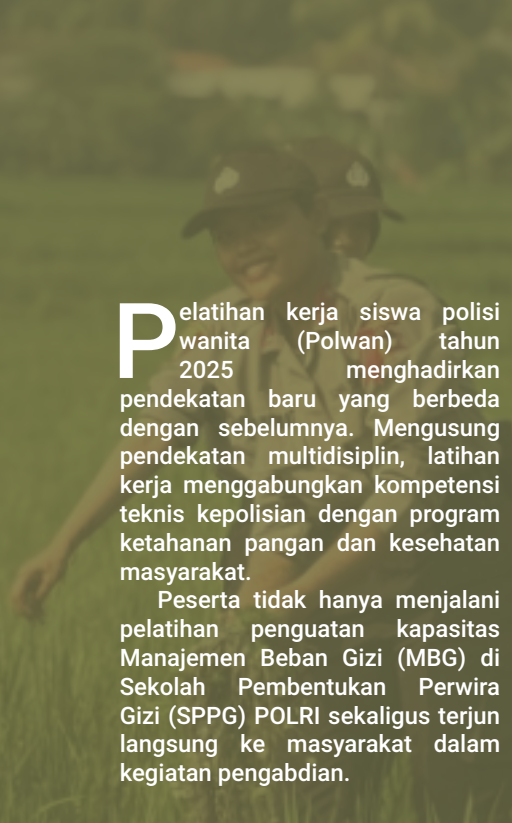
Sistem pembelajaran akan mengadopsi kurikulum International Baccalaureate (IB), kurikulum Cambridge, dan kurikulum nasional Merdeka dengan jumlah siswa yang akan dibatasi hanya 120 orang dengan sistem *boarding school* atau sekolah berasrama.

Diharapkan dengan kurikulum itu SMA Kemala Taruna Bhayangkara diharapkan mampu mencetak lulusan unggul yang memiliki karakter nasional yang kuat dan juga berdaya saing global.

Tak hanya fokus pada pendidikan akademik, SMA Kemala Taruna Bhayangkara juga menekankan pembinaan intensif, pembangunan karakter, kepemimpinan, dan soft skills berbasis nilai-nilai kebhayangkaraan. Lulusan SMA Kemala Taruna Bhayangkara akan diproyeksikan masuk ke universitas-universitas unggulan dunia dan masuk ke akademi kedinasan seperti Akademi Kepolisian, Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara dan Akademi Angkatan Laut. [*]



Sepolwan Membangun Sinergi dengan Sistem Pengabdian



Pelatihan kerja siswa polisi wanita (Polwan) tahun 2025 menghadirkan pendekatan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Mengusung pendekatan multidisiplin, latihan kerja menggabungkan kompetensi teknis kepolisian dengan program ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Peserta tidak hanya menjalani pelatihan penguatan kapasitas Manajemen Beban Gizi (MBG) di Sekolah Pembentukan Perwira Gizi (SPPG) POLRI sekaligus terjun langsung ke masyarakat dalam kegiatan pengabdian.

Sebanyak 456 siswa polwan angkatan ke-57 ini mengikuti pelatihan kerja tersebut selama 10 hari, mulai dari tanggal 14 Mei 2025 hingga 23 Mei 2025.

Kepala Sepolwan Kombes Pol. Dr. Melda Yanny menjelaskan bahwa latihan kerja tahun ini menggunakan sistem *live-in*. Sistem tersebut mengharuskan para siswa untuk tinggal di rumah warga sekaligus terlibat langsung dengan kehidupan mereka. Latihan kerja tahun ini dirancang untuk mencetak polwan yang adaptif dan memiliki daya saing.





“Latja ini bukan sekadar pelatihan, tetapi laboratorium pengabdian nyata. Kami ingin setiap siswa tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan komitmen mengawal Asta Cita Pemerintah, khususnya di bidang pangan dan kesehatan. Polwan harus menjadi garda terdepan yang menghubungkan institusi dengan masyarakat,” Kombes Pol. Melda Yanny.

Diharapkan, pelatihan kerja menjadi model pendidikan

kepolisian yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Fokus kegiatan meliputi penguatan teknis kepolisian seperti simulasi penanganan kasus, patroli, manajemen konflik, serta ketahanan pangan yakni pendampingan petani/nelayan, revitalisasi lahan, teknologi pertanian dan kesehatan masyarakat berupa pengukuran antropometri anak, edukasi pola hidup sehat, pencegahan stunting.

Sementara melalui penerapan sistem *live-in* ini, kini para siswa tidak hanya melakukan pelatihan

di Sekolah Pembentukan Perwira Gizi (SPPG) Polri untuk penguatan kapasitas manajemen beban gizi. Mereka secara langsung dapat terjun ke masyarakat dalam kegiatan pengabdian berbasis community policing yang bertujuan untuk membangun kemitraan strategis antara Polri dan masyarakat.

“Dalam format *live-in*, siswa Polwan melakukan pendataan kesehatan balita dan remaja melalui pengukuran antropometri, menggerakkan kelompok

“Khusus siswa dengan kompetensi gizi yang dilatih di SPPG POLRI, mereka terlibat dalam program *capacity building* untuk penanganan malnutrisi, termasuk analisis data gizi wilayah dan penyusunan rekomendasi kebijakan,”

tani/ternak dengan pelatihan diversifikasi produk pangan, serta membantu pemasaran produk UMKM berbasis digital,” ujar Kombes Pol. Melda Yanny.

Sementara itu, dalam konteks *community policing*, pendekatan ini memungkinkan siswa Polwan menjadi agen perubahan yang memahami kebutuhan nyata masyarakat. Dengan tinggal langsung bersama warga, mereka dapat mendeteksi masalah sosial secara langsung, menawarkan solusi berbasis komunitas, dan membangun hubungan kepercayaan yang lebih erat.

Kegiatan utama latihan kerja ini antara lain mencakup penguatan teknis kepolisian melalui simulasi kasus kriminal dan manajemen konflik, pendampingan ketahanan pangan dengan revitalisasi lahan dan teknologi presisi, serta pemantauan kesehatan masyarakat seperti edukasi gizi dan pencegahan stunting.

“Khusus siswa dengan kompetensi gizi yang dilatih di SPPG POLRI, mereka terlibat dalam program *capacity building* untuk penanganan malnutrisi, termasuk analisis data gizi wilayah dan penyusunan rekomendasi kebijakan,” ujar Kombes Pol. Melda Yanny.

Selain keterampilan teknis, siswa juga dilatih untuk pengembangan karakter melalui pembentukan disiplin dan empati melalui pengalaman langsung yang dapat membentuk fondasi etika profesi.

Latihan kerja yang mengedepankan sistem pengabdian ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka secara inovatif. Tujuannya adalah mencetak Bhayangkara yang profesional, humanis, dan memiliki karakter yang tangguh.

Di samping berbagai pelaksanaan pelatihan fungsi teknis Polri, pada pelatihan kali ini juga siswa melaksanakan berbagai kegiatan sosial lain di luar fungsi tersebut. Seperti bakti kesehatan dengan pelayanan dasar dan edukasi gizi, bakti penghijauan melalui penanaman pohon, bakti religi di tempat ibadah, serta bakti pendidikan melalui penyuluhan di sekolah dan madrasah. Mereka juga menyambangi komunitas masyarakat seperti PKK dan karang taruna untuk berbagi pengetahuan serta mengadakan simulasi *urban farming* dan edukasi gizi. [*]



Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Tribrata dan Catur Prasetya



Lebih dari tujuh dekade sejak kelahirannya, Pancasila telah menjadi penuntun arah bagi perjalanan Indonesia. Bukan sekadar hafalan dalam upacara, tetapi pedoman hidup yang harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) internalisasi Pancasila berarti menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri setiap individu, sehingga menjadi pedoman hidup dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari seperti yang telah dirumuskan dalam Tribrata dan Catur Prasetya.

Kepala Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia (Karobinkar SSDM) Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo mengakui selain nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya anggota Polri perlu merevitalisasikan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat.

“Jangan putus asa dengan penilaian publik. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Polri memiliki peluang mewujudkan harapan masyarakat,” kata Brigjen Pol. Langgeng Purnomo seperti disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Polri Melalui Penguatan Internalisasi Tribrata dan Catur Prasetya dalam Menghadapi Indonesia Emas 2045” “Polri punya peluang besar menjawab harapan publik, asal tidak berhenti berbenah,” kata dia.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian Kopolnas Irjen Pol. (Purn) Arief Wicaksono Sudiotomo mengingatkan anggota Polri agar dalam melakukan tugasnya tidak saja berpedoman kepada Tribrata dan Catur Prasetya Polri saja, tetapi juga memegang teguh nilai-nilai yang menjadi perekat kebangsaan Indonesia.

Ia menyebut ada UUD 1945, Pancasila, dan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat, yang bisa dijadikan Polri untuk merevitalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.

"Nilai-nilai Pancasila otomatis teramalkan jika anggota Polri mewujudkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Pelayanan Polri sudah bagus tetapi harus terus ditingkatkan seiring tingginya ekspektasi dan perubahan di masyarakat," kata dia.

Sekadar mengilas balik sejarah, saat berpidato di hari ketiga sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Gedung Chuo Sangi In pada 1 Juni 1945 dalam Ir Soekarno menawarkan lima prinsip *philosofische grondslag* atau dasar filosofis Indonesia yang merdeka.

Lima dasar yang meliputi Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan dan Ketuhanan yang Berkebudayaan itu menurut Soekarno harus menjadi pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka.

"Dasar-dasar Negara" telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini.

Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indera. Apa lagi yang lima bilangannya?" tanya Soekarno kala itu pada peserta sidang.

"Namanya bukan Panca Dharma, tetapi – saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi."

Meskipun susunan dan redaksinya berbeda dengan versi Pancasila sekarang, pidato Bung Karno tersebut menjadi titik awal konseptualisasi ideologi negara yang inklusif dan mewakili semangat pluralisme bangsa.

Menyusul sidang tersebut, BPUPKI kemudian membentuk Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan naskah kompromi antara berbagai usulan. Panitia ini dipimpin oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Mohammad Hatta dan KH. Agus Salim. Hasil kerja mereka melahirkan Piagam Jakarta, yang menjadi dasar dalam pembentukan Pembukaan UUD 1945.

Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara resmi mengesahkan rumusan final Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta yang terakhir Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.[*]



Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melepas 700 buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) ke tempat kerja baru. Acara pelepasan ini di laksanakan di Gedung Rupattama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis, 12 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Kapolri menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan.

Dirinya mengungkapkan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah, Desk Ketenagakerjaan Polri, Serikat Buruh, dan perusahaan-perusahaan terkait dalam menciptakan kesempatan kerja baru bagi buruh yang terkena dampak PHK.

Atasi Persoalan Ketenagakerjaan,

KAPOLRI LEPAS 700 BURUH TERDAMPAK PHK





"Khusus untuk buruh yang terdampak, kita memberikan ruang, bisa lapor di Desk Ketenagakerjaan di Mabes. Bisa melaporkan di wilayahnya masing-masing untuk kemudian nanti kita komunikasikan,"



"Kami berkolaborasi untuk mencari dan mempersiapkan mereka untuk bisa kemudian mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru," kata Kapolri.

Para buruh yang diberangkatkan ini merupakan korban PHK dari lima perusahaan daerah Tangerang, Cirebon, dan Garut. Mereka kini akan bekerja di PT Tang Suh Hung, Brebes dan PT Indonesia Dremers Sport, Cirebon. Penempatan buruh ini dilakukan di perusahaan dengan sektor yang sama seperti perusahaan sebelumnya.

"Karena ini memiliki karakteristik jenis industri yang hampir sama, pada saat ditawarkan pada teman-teman, mereka menyambut baik," kata Kapolri.

Berdasarkan catatan Desk Ketenagakerjaan Polri, dua perusahaan ini disebutkan membutuhkan sekitar 35.000 pekerja. Untuk itu, peluang bagi buruh yang terdampak PHK masih terbuka luas.

"Dari PT Tah Sung Hung ada 20.000, kemudian PT Indo Dremers Sports ada kurang lebih 15.000. Dan ini tentunya menjadi kabar yang baik untuk rekan-rekan, khususnya yang memiliki pekerjaan yang hampir mirip," jelas Kapolri.

Peluang Terbuka

Kapolri memastikan bahwa peluang ini terbuka luas bagi buruh lainnya yang juga terdampak PHK. Polri melalui Desk Ketenagakerjaan siap memfasilitasi setiap buruh yang ingin mendaftar untuk mendapatkan pekerjaan baru di sektor yang sesuai.

"Khusus untuk buruh yang terdampak, kita memberikan ruang, bisa lapor di Desk Ketenagakerjaan di Mabes. Bisa melaporkan di wilayahnya masing-masing untuk kemudian nanti kita komunikasikan," kata Kapolri.

Selain memfasilitasi penempatan kerja, Polri juga memberikan perhatian khusus bagi buruh yang belum memiliki pengalaman atau keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Kapolri menyampaikan bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyediakan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Dan, apakah perlu nanti ada pelatihan yang baru, nanti kita juga akan koordinasi dengan Kemnaker ataupun industri itu sendiri, sehingga kemudian tenaga ini jadi siap dan kemudian kita salurkan," kata Kapolri.

Kapolri juga mengungkapkan harapannya bahwa program yang dirancang melalui kolaborasi berbagai pihak ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek bagi para buruh yang terdampak PHK, akan tetapi dapat menjadi program yang mampu menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

"Harapan kami kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan kami minta desk ketenagakerjaan yang beberapa waktu lalu sudah kita latih bersama. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan dapat menuntaskan dari permasalahan buruhnya sampai mengomunikasikan sehingga mereka bisa mendapatkan lapangan kerja yang baru," kata Kapolri. [*]

Mewujudkan Sinergitas dengan BHAYANGKARA SPORT DAY 2025

Menyambut Hari Bhayangkara ke-79, Polri menggelar acara Bhayangkara Sport Day 2025 yang dibuka di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Sabtu, 21 Juni 2025.

Mengusung tema Harmoni Langkah Persatuan, Polri mengajak seluruh penegak hukum untuk ikut berpartisipasi dalam gelaran acara Bhayangkara Sport Day 2025.

Menurut Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, langkah tersebut merupakan wujud sinergitas antar kementerian dan lembaga. "Jadi, kegiatan hari ini merupakan bentuk sinergitas, soliditas, antara TNI, Polri dan seluruh aparat penegak hukum, Kejaksaan, kemudian ada MA, KPK, dan juga rekan-rekan dari Kementerian Hukum dan HAM," ujar Kapolri.

Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta yang terdiri dari berbagai instansi tersebut.

Melalui kegiatan ini, Kapolri mengharapkan dapat tumbuh semangat kebersamaan dan suportivitas di kalangan aparat penegak hukum dan pertahanan negara.



Acara Bhayangkara Sport 2025 ini secara resmi dibuka oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua KPK Setyo Budiyo dengan mengangkat bendera secara simbolik.

Rangkaian acara Bhayangkara Sport 2025 ini kemudian dilanjutkan dengan jalan santai bersama, berbagai fun games, hingga peluncuran resmi Pekan Olahraga Polri.

Pekan Olahraga Polri ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh Polda jajaran dengan mempertandingkan tujuh cabang olahraga. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi karate, badminton, taekwondo, judo, menembak, basket, dan tenis lapangan.

"Ini juga merupakan kegiatan bersama lintas kementerian/lembaga yang tentunya ini juga bagian menjaga

sinergitas dan soliditas. Namun, di satu sisi kami juga mencari atlet-atlet ataupun talenta baru yang bisa kami persiapkan untuk ajang nasional maupun internasional," jelas Kapolri.

Acara Bhayangkara Sport 2025 ini juga tidak hanya diperuntukkan bagi aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, acara ini juga menjadi ajang untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat. Berbagai aktivitas dirancang Polri agar masyarakat dari berbagai lapisan dapat ikut serta dan merasakan manfaat dari kegiatan ini.

Car Free Day

Sehari setelah pembukaan acara Bhayangkara Sport 2025, Polri kembali melanjutkan acaranya ini tersebut di Car Free Day Bhayangkara Sport Day yang berpusat di Kawasan Car Free Day Bundaran HI.

Berbagai stand layanan publik disediakan secara gratis oleh Polri, mulai dari perpanjangan Surat Izin

Mengemudi, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan, hingga penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Tidak hanya layanan administratif, Polri juga menyediakan cek kesehatan gratis, meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan mata, laboratorium, pembagian vitamin, hingga konsultasi dokter.

Kegiatan Bhayangkara Sport Day ini tidak hanya digelar di Jakarta, acara ini juga digelar serempak di seluruh Polda jajaran.

Kapolri juga turut menyapa Polda jajaran seluruh Indonesia melalui konferensi video. Dalam konferensi videonya itu, Kapolri menyampaikan harapannya agar seluruh anggota Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan jajarannya untuk selalu menjaga solidaritas dan kekompakan dalam menjalankan tugas.

"Kepada seluruh rekan-rekan yang tersambung di 36 Polda jajaran, tentunya saya tidak bisa menyapa satu per satu, namun terima kasih atas seluruh pelaksanaan kegiatannya dan mudah-mudahan kegiatan Car Free Day hari ini betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang hadir di kegiatan rekan-rekan," kata Kapolri.

"Salam untuk seluruh anggota, terus jaga kekompakan soliditas dan mudah-mudahan menuju Hari Bhayangkara, kegiatan-kegiatan rekan-rekan terus membantu masyarakat, terima kasih salam untuk semuanya," imbuhnya. [*]



Menggali sejarah sekaligus meneladani jejak perjuangan bangsa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melakukan ziarah ke makam Presdien ke-1, Soekarno, di Bendogerit, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, pada Rabu, 25 Juni 2025.

Dalam ziarah tersebut, Kapolri didampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sejumlah pejabat utama Mabes Polri, serta jajaran Polda Jatim.

"Dalam kegiatan ziarah ini tentunya kami ingin menggali nilai sejarah, napak tilas dari para pemimpin nasional bangsa kita," kata Kapolri.

Selain untuk menggali nilai-nilai sejarah, ziarah sekaligus menjadi bagian rangkaian menyambut Hari Bhayangkara ke-79 pada 1 Juli mendatang. Ziarah juga bertujuan untuk mengenang jasa para tokoh bangsa yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara.

Menggali Semangat Perjuangan,

Kapolri Ziarah

ke Makam Tokoh Bangsa



Menurut Kapolri, nilai-nilai perjuangan para tokoh bangsa ini merupakan warisan berharga yang dapat menjadi pedoman bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan.

"Banyak tentunya yang menjadi pelajaran bagi kami semua sebagai generasi muda penerus bangsa untuk menjalankan, mengamalkan hal-hal yang menjadi cita-cita dalam menghadapi dan mempersiapkan diri demi mewujudkan visi Indonesia," ujar Kapolri.

Ia menambahkan, perjalanan sejarah yang diwariskan oleh para tokoh bangsa tidak hanya mengandung nilai-nilai luhur. Jauh daripada itu, perjalanan sejarah juga relevan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan saat ini.

"Semuanya banyak nilai yang harus kita serap, yang diamalkan dari amanat beliau sebagai pemimpin nasional," tambahnya.

Kegiatan ziarah ke makam Presiden Soekarno ini sekaligus menjadi penutup rangkaian ziarah tokoh bangsa yang dilakukan oleh Kapolri bersama jajarannya.

Sebelumnya, di hari yang sama, Kapolri juga telah melakukan ziarah ke makam Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid, di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Sehari sebelumnya, pada Selasa, 24 Juni 2025, Kapolri juga melakukan ziarah ke makam Presiden ke-2, Soeharto, di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah.



Kapolri juga telah melakukan ziarah ke beberapa makam tokoh nasional lainnya di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan, pada Senin, 23 Juli 2025.

Kegiatan ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata ini diselenggarakan secara resmi melalui prosesi upacara penghormatan. Upacara ini diikuti oleh sejumlah anggota Polri di depan monumen Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri memimpin langsung penghormatan kepada arwah para pahlawan, yang kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga, serta pembacaan doa. Setelah prosesi upacara selesai, Kapolri bersama jajaran Mabes Polri melakukan tabur bunga di sejumlah makam pahlawan yang ada di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Di antaranya, Kapolri melakukan tabur bunga di makam Presiden ke-3, B. J. Habibie.

Selain di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Kapolri juga menyempatkan diri berziarah ke makam Kapolri ke-5 Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso di Tempat Pemakaman Bukan Umum Giritama, Bogor, Jawa Barat. Kapolri juga melakukan silaturahmi dengan keluarga almarhum Jenderal Soegeng, yaitu Ibu Meriyati Roeslani atau Ibu Mery Hoegeng.

Kegiatan ziarah ini, selain menjadi ajang refleksi, juga menegaskan komitmen Polri untuk terus menghormati nilai-nilai perjuangan para pahlawan. [*]

Humas Polri

RAIH PREDIKAT *Wilayah Bebas Korupsi*

Penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga integritas dalam setiap lini tugas.



Divisi Humas Polri mendapatkan penghargaan Pembangunan Zona Integritas predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kepada Kadiv Humas Irjen Pol. Sandi Nugroho.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri yang digelar di Gedung Mutiara STIK Lemdiklat Polri pada Kamis, 19 Juni 2025.

Pada acara Musrenbang yang mengusung tema Polri yang Presisi Mendukung Peningkatan Produktivitas Swasembada Pangan, Energi, dan Ekonomi Inklusif ini, penghargaan yang diberikan kepada Divisi Humas Polri ini merupakan hasil evaluasi dari pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi mandiri di lingkungan Polri tahun 2024.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga integritas dalam setiap lini tugas. Ia berharap keberhasilan ini dapat memacu semangat seluruh jajaran untuk memberikan kontribusi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Selamat kepada para Satuan Kerja yang telah mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dan Pelayanan Prima. Terus tingkatkan kehadiran, berikan kemudahan, serta berorientasi pada kepentingan

dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” jelas Kapolri.

Acara yang juga dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, ini menjadi ajang untuk mengapresiasi berbagai satuan kerja Polri yang berkomitmen dalam reformasi birokrasi.

Dalam sambutannya, Menteri Rini menyampaikan bahwa penghargaan ini menunjukkan komitmen Polri dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. Ia juga berharap penghargaan ini menjadi tonggak untuk mempertahankan dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para pemenang tadi yang sudah disebutkan, semoga layanan-layanan dan reformasi yang sudah dilakukan bisa terus berlangsung," ujar Menteri Rini.

"Reformasi birokrasi itu bukan sekedar perubahan administrasi, tapi perubahan cara kerja dan olah pikir. Birokrasi tentunya harus dapat menciptakan pelayanan

publik yang responsif dan adaptif dan kelembagaan yang bersih, profesional sehingga kinerjanya berdampak langsung kepada masyarakat," lanjutnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho menyampaikan rasa sukurnya atas penghargaan yang diraih. Ia menyebut, prestasi ini adalah hasil dari kerja sama jajaran Divisi Humas Polri yang selalu bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.



Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Divisi Humas Polri menjadikan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi ini sebagai tonggak untuk merefleksikan kinerja dan strategi ke depan. Divisi Humas Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang berbasis teknologi modern dan pendekatan yang lebih humanis. Hal ini sejalan dengan visi Polri Presisi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap kebijakan dan tindakan.

"Kami akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada media dan masyarakat. Penghargaan ini juga tidak menjadikan kami berpuas diri dan akan terus berinovasi untuk menjadikan Polri Presisi untuk masyarakat," ungkap Irjen Pol. Sandi.

Selain Divisi Humas Polri, sebanyak 21 Satuan Kerja (Satker) Polri lainnya juga menerima penghargaan serupa atas upaya mereka dalam menciptakan zona integritas yang berorientasi pada pelayanan publik.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa reformasi birokrasi di tubuh polri terus bergerak maju. Momentum ini juga diharapkan dapat menginspirasi seluruh jajaran Polri untuk terus menjaga integritas, memberikan pelayanan berkualitas, dan menjadi motor penggerak reformasi birokrasi yang lebih baik di masa depan. [*]





Prof. Mr. Djokosoetono; Peletak Dasar Intelektualitas di Kepolisian

Djokosoetono memperkenalkan pedoman Tribrata sebagai kaul luhur yang menjadi pedoman hidup dan kode etik bagi seluruh anggota Korps Bhayangkara.

Memasuki gerbang utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), sebuah patung berdiri megah di pelataran. Menyambut siapa saja yang masuk ke kampus tersebut. Patung itu ialah Prof. Mr. Djokosoetono, pendiri STIK yang namanya lebih sering disebut daripada dibaca kisah hidupnya.

Berdiri kokoh di pelataran terbuka, wajah Prof. Mr. Djokosoetono terpatri dalam pose abadi. Tatapannya seolah menembus waktu, mengawasi penerus yang melintas di

hadapannya. Lengkap dengan toga dan buku digenggamannya, patung ini secara tepat menggambarkan sosok visioner yang menjung tinggi intelektualitas dan moralitas.

Tak hanya di pelataran STIK, patung serupa juga dibangun di Fakultas Hukum Universitas Indonesia lengkap dengan julukannya sebagai Guru Pinandita yang menggambarkan penguasaan terhadap bidang akademik dan kebijaksanaan.

Berbagai kontribusi yang diberikan selama hidupnya ini mendapatkan berbagai

penghormatan sebagai bentuk pengakuan atas jasa-jasanya. Penghormatan itu termasuk Bintang Bhayangkara Kelas III oleh Presiden atas dedikasinya yang luar biasa terhadap Polri. Namanya, juga diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota sebagai pengingat peran pentingnya membangun fondasi pendidikan dan hukum di tanah air.

Selain kontribusinya dalam dunia pendidikan dan hukum, Djokosoetono meninggalkan warisan di luar ranah akademik melalui keluarganya yang



mendirikan Blue Bird Group. Bermula dari usaha kecil yang didirikan istrinya, Mutiara Fatimah Djokosoetono di tahun 1965, Blue Bird Group menjelma menjadi salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia sukses beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Meski tidak secara langsung terlibat dalam pendirian usaha tersebut, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Djokosoetono -seperti kejujuran, disiplin, dan kerja keras- menjadi fondasi moral bagi keluarga dalam membangun dan mengelola Blue Bird. Nilai-nilai yang diwariskannya tercermin dalam pelayanan perusahaan, yang hingga kini dikenal luas karena profesionalismenya.

Lahir 5 Desember 1904 di Surakarta, Djokosoetono yang

berdarah biru itu dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi adat dan pendidikan sekaligus. Menempuh Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) lalu di Algemene Middelbare School (AMS), titik balik hidupnya bermula ketika diterima di Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Di sinilah ia meraih gelar Meester in de Rechten (Mr.) yang menjadi modalnya untuk membangun pendidikan hukum dan kepolisian di Indonesia.

Tak hanya belajar hukum Barat seperti filsafat Jerman dan pemikiran Prancis, Djokosoetono juga menyelami kebijaksanaan local dan tenggelam dalam naskah-naskah klasik seperti Serat Centhini dan buah pikiran Ranggawarsita.

Gabungan timur dan barat itulah yang pada akhirnya

membentuk Djokosoetono mampu menjembatani Timur dan Barat memadukan nilai-nilai modern dan tradisional sekaligus mengimplementasikan di dunia akademik.

Di masa damai setelah pengakuan kedaulatan di tahun 1949, Djokosoetono dipercaya sebagai Dekan Fakultas Hukum Sosial dan Politik di Universitas Gadjah Mada. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Universitas Indonesia. Di dua institusi itulah, Djokosoetono membangun fondasi pendidikan hukum yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga berorientasi pada praktik dan pengabdian masyarakat.





PROF. DJOKOSOETONO
5 DESEMBER 1903 – 6 SEPTEMBER 1965

Prof. Djokosoetono, tokoh yang memperjuangkan pendidikan hukum dengan visi negara hukum yang demokratis. Sebagai pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan pencetus konsep Tribrata, beliau juga berjasa sebagai dekan pertama FHUI dan pelopor penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dalam pengajaran hukum.

Prof. Mr Djokosutono.

- **Polisi Akademi**
- Bersama Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo yang kala itu menjabat Kepala Djawatan Kepolisian Nasional, Djokosoetono mendirikan Polisi Akademi, cikal bakal Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
- Diangkat sebagai Ketua Dewan Guru Besar Polisi Akademi Djokosoetono menunjukkan kepemimpinan yang visioner. Ia menggagas pembaruan signifikan dengan mendatangkan dosen-dosen ahli dari berbagai keilmuan. Pendekatan ini diharapkan melahirkan polisi-polisi yang tidak hanya mumpuni secara teknis dalam menegakkan hukum, melainkan mereka juga dibekali dengan wawasan akademik.

- Menurutnya, kepolisian harus dibangun dengan landasan intelektualisme dan profesionalisme dan PTIK harus mampu menyiapkan kebutuhan pengetahuan yang luas di bidang hukum dan bidang kemasyarakatan bagi para perwira polisi. Gagasan ini penting karena Djokosoetono tak ingin polisi terjebak pada paradigma ‘tukang gebuk’ pemerintah dan ‘tukang penyelidik’ dalam menjalankan tugas yustisialnya.
- Ada tiga pikiran besar Djokosoetono terkait tugas polisi di zaman modern yakni tugas yuridis sebagai penegak hukum, tugas bestuurlijk dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tugas sosial dalam rangka usaha preventif mencegah dan menjauhkan masyarakat dari kejahatan.
- Di PTIK, Djokosoetono menggembleng para mahasiswanya dengan pedoman Tribrata yang menjadi landasan mendisiplinkan para anak didiknya. Tribrata awalnya diperkenalkan sebagai sumpah bagi para wisudawan PTIK, namun seiring waktu maknanya meluas dan menjadi landasan moral bagi seluruh anggota kepolisian Indonesia. Pada 1 Juli 1955, Tribrata diresmikan sebagai pedoman hidup bagi Korps Bhayangkara.
- Dengan latar belakang sebagai akademisi dan pemimpin visioner, terbukti Djokosoetono sanggup menunjukkan bahwa keberhasilan melampaui dirinya sendiri sekaligus menginspirasi keluarganya berkarya dan memberikan manfaat pada masyarakat luas.
- Salah satu ucapannya cukup terkenal dari dirinya yaitu, “Aku tak dapat meninggalkan apa-apa kepada anak-anakku, aku hanya meninggalkan nilai-nilai yang idiil.” Blue Bird, yang dimulai sebagai usaha sederhana, kini menjadi simbol transformasi dari semangat intelektualisme dan kemanusiaan yang ia wariskan [*]



Pengabdian di Tapa1 Batas, *Perjuangan Menyulam Asa di Tanah Papua*

Inisiatif membangun perpustakaan muncul lantaran anak-anak terkendala akses pendidikan, sehingga tidak semua anak di Kampung Baburia bisa sekolah.

Bripka Batias Yikwa merupakan Banit 3 Satreskrim Polres Keerom, Polda Papua. Pada tahun 2023, dia mendirikan rumah baca atau perpustakaan sebagai tempat anak-anak di Kampung Baburia, Keerom, untuk belajar membaca dan meningkatkan literasi bagi yang sudah bisa membaca.

Inisiatif pendirian perpustakaan itu muncul lantaran anak-anak di desa binaannya terkendala akses pendidikan, sehingga tidak semua anak di Kampung Baburia bisa sekolah.

"Jadi di kampung binaan saya ini sangat luas, tapi yang ada sekolah itu cuma satu dusun. Terus yang dekat dengan sekolah itu cuma dua dusun. Selain dari itu, cukup jauh," kata Bripka Batias.

Adanya perpustakaan tersebut ternyata tidak hanya menarik anutusias dari anak-anak, melainkan orang-orang dewasa di daerah binaannya juga ikut tertarik untuk memanfaatkan fasilitas yang digagas oleh Bripka batias.

Kendala akses terhadap pendidikan di Kampung Baburian menciptakan efek domino yang berkepanjangan. Minimnya bangku pendidikan formal tidak hanya berdampak pada anak-anak, melainkan juga meninggalkan jejak di generasi sebelumnya.

Keterbatasan itu menyebabkan beberapa orang dewasa di kampung tersebut tumbuh tanpa dibekali kemampuan membaca.

Di hadapan realita itu, Bripka Batias Yikwa menjadikan rumah baca yang didirikannya lebih dari sekadar ruang belajar untuk anak-anak. Ia membuka pintunya lebar-lebar bagi para orang tua yang ingin mengubah nasib mereka melalui kemampuan membaca.

"Ada beberapa orang tua juga mereka tidak tahu membaca, sehingga saya mengajarkan mereka untuk membaca," kata Bripka Batias.

Selain bantu mengatasi kendala pendidikan, Bripka Batias juga berkontribusi pada sektor pertanian. Dirinya menjadi penggerak warga untuk membuka lahan pertanian dengan jenis tanaman baru.



"Karena di sana di kampung binaan, masyarakat petani cuman mereka itu berkebun cuma tanam ubi dengan singkong. Jadi saya buka lahan itu untuk tanaman-tanaman lain. Seperti kacang tanah, kacang panjang, teras jagung," kata Bripka Batias.

Upaya Bripka Batias bersemi bak benih di musim hujan.

Antusiasme warga Kampung Baburia mengalir deras bagai sungai yang menemukan jalur barunya. Akhirnya, dirinya membagi warganya ke dalam beberapa kelompok tani untuk kemudian diajarkan cara bertani yang baik.

"Jadi jumlah kelompok 3. Setiap kelompok saya bagi 20 orang, jadi semuanya 60 orang," kata Bripka Batias.





Bripka Batias tak hanya berhenti pada pembentukan kelompok tani, tetapi telah menghasilkan perubahan konkret dalam kehidupan warga Kampung Baburia. Tiga kelompok tani yang terdiri dari 60 orang tersebut kini menuai hasil nyata dari lahan mereka.

Dengan mata yang penuh perhatian, Bripka Batias menyaksikan metamorfosis ekonomi yang terjadi di kampung binaannya. Bulan demi bulan, ia mencatat kemajuan yang signifikan. Dari lahan-lahan yang semula hanya menghasilkan ubi kayu dan singkong, kini telah bertransformasi menjadi hamparan produktif dengan komoditas yang lebih beraneka ragam dan membantu mendongkrak roda perekonomian.

"Jadi hasil tanamannya dijual dijadikan uang, terus untuk membeli kebutuhan mereka seperti pakaian, bumbu dapur juga," ujar Bripka Batias.

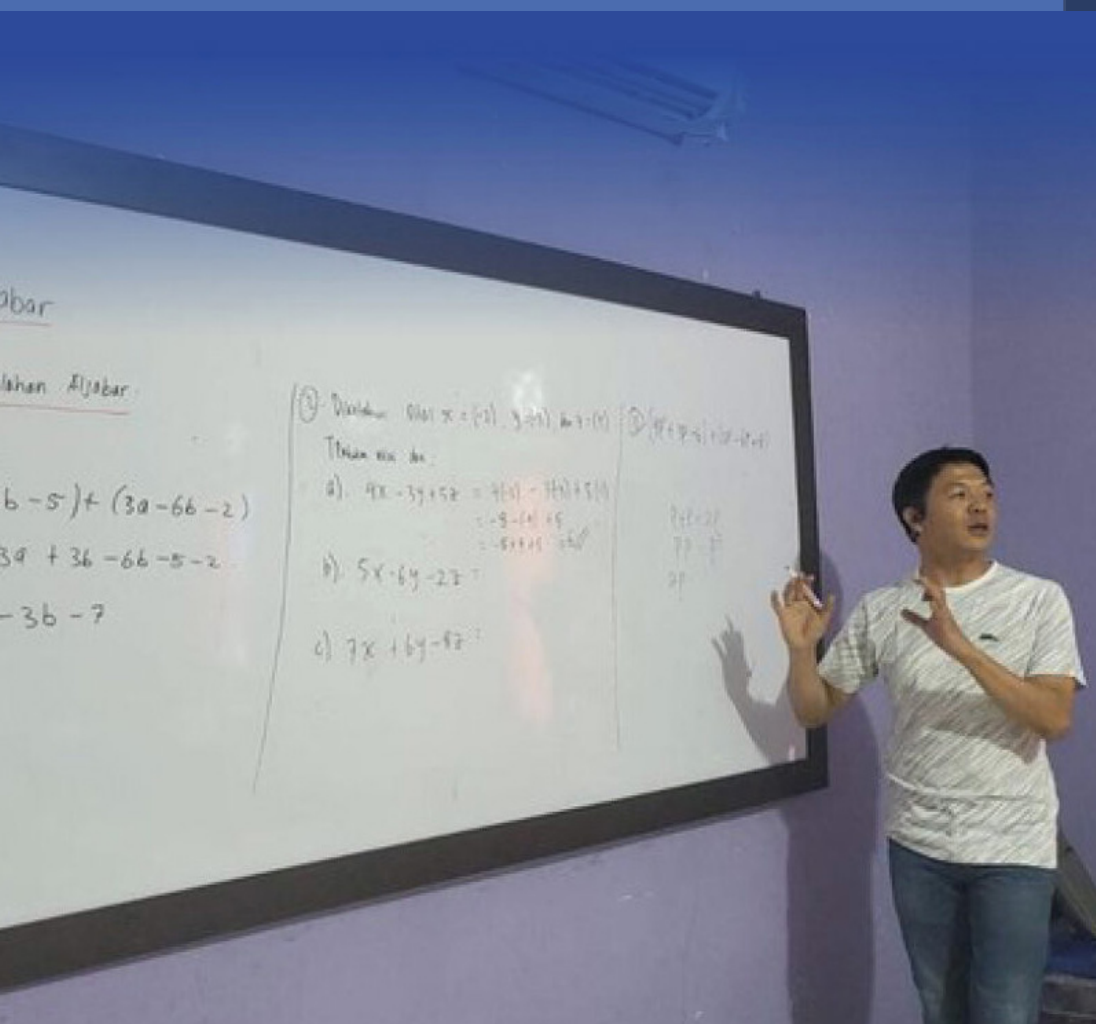
Tidak hanya membantu pendidikan dan pertanian, Bripka Batias juga kerap membantu warganya dalam menyelesaikan masalah sosial. Dirinya sengaja menyambangi warga untuk turun langsung membantu mengatasi berbagai permasalahan mereka. Permasalahan tersebut mulai dari kesalahpahaman antar warga, permasalahan hak milik tanah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga judi.

Berkat komitmen dan dedikasinya, nama Bripka Batias akhirnya masuk salah satu nominasi Hoegeng Awards 2025 kategori Polisi Tabal Batas dan Pedalaman. [*]



Ketika Lencana Menjadi Sebuah Lentera

Kedekatannya dengan generasi muda juga dimanfaatkan untuk kampanye berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian.



Suara riuh anak-anak memecah kesunyian Mapolsek Batu Ampar suatu sore di tahun 2016. Di salah satu ruang markas polisi yang disulap sedemikian rupa menjadi kelas darurat, deretan kursi dan meja belajar menggantikan suasana formal khas kantor polisi.

Bau spidol kini membaur dengan aroma seragam polisi yang baru saja selesai dinas, menciptakan atmosfer unik yang mungkin tak ditemukan di tempat bimbel lain.

Di depan papan tulis, Kompol Tatang Yulianto -saat itu masih AKP- sibuk menuliskan rumus-rumus matematika dengan spidol hitamnya. Jemarinya lincah menggoreskan angka dan simbol, sesekali berhenti untuk menatap wajah-wajah kecil yang duduk rapi di kursi mereka, mengawasi apakah mereka memahami penjelasannya. Kala itu, matematika menjadi pelajaran inti yang diajarkannya.

“Mereka ada kesulitan masalah belajar, kebetulan belajar matematika, jadi kita belajar matematika aja,” kata Kumpul Tatang.

Cikal bakal tersebutlah yang mendorong Kumpul Tatang mendirikan bimbel gratis di tempatnya berdinias.

Ia seorang diri menjadi tenaga pengajar di bimbel tersebut. Dirinya menjelma menjadi orkestra tunggal yang memainkan dua simfoni sekaligus; di siang hari, suaranya menggemakan memberi komando operasi kepolisian, sedangkan di sore hari, nada bicaranya berubah lembut membimbing lebih dari 100 anak yang haus akan ilmu.

Sayangnya, setelah beberapa bulan bimbel tersebut beroperasi, Kumpul Tatang dipindahtugaskan ke Akademi Polisi

Semarang. Dirinya belum sempat mencari guru pengganti, sehingga terpaksa kegiatan bimbel harus terhenti.

“Cuma berjalan berapa bulan, saya pindah ke Akpol jadi dosen juga, jadi jauh, nggak sempat transisi,” jelasnya.

Kepindahan ke Akpol Semarang hanya jeda semata, bukan akhir dari tekad yang telah ia lakoni di Batu Ampar. Di balik rutinitas barunya melatih calon polisi, tekadnya terus membara.

Ketika dipindahtugaskan kembali ke Polres Lubuklinggau sebagai Kabag Ops, sebuah tekad lama kembali menyala dalam dadanya. Ia akhirnya kembali mendalami peran yang pernah terpaksa ditinggalkannya; membawa cahaya ilmu ke tengah anak-anak



lewat bimbel gratis yang lebih matang dan terorganisir.

Kompol Tatang kemudian merancang konsep baru, sistem bimbel yang tak akan mati meski ia harus pergi lagi. Dari rancangan itu, akhirnya pada tahun 2021 lahirlah bimbel yang ia namai Bimbel Cendekia Parahita, sebuah ruang belajar yang lahir dari tekad dan pengalamannya.

“Honor pengajar kan beda-beda, ada yang minta 600 ribu, ada yang minta 300 ribu, kita semi-sosial gitulah, tapi jangan sampai dirugikan waktu, dirugikan biaya, jadi mereka juga paham nggak sesuai UMR nggak sesuai hitungan jam mengajar,”

Persiapan Matang

Berbeda dengan sebelumnya, kali ini ia menyiapkan segalanya dengan matang, dari tenaga pengajar hingga fasilitas belajar yang lebih terorganisir. Tak hanya itu, dirinya juga memperluas cakupan mata pelajaran yang diajarkan, dari yang mulanya hanya matematika, kini ia tambah mata pelajaran bahasa Inggris, hingga ilmu pengetahuan alam untuk berbagai jenjang.

Rumah bimbel yang didirikannya memanfaatkan bangunan bekas kantor dinas Pemkot Libuklinggau. Dari dukungan pemberian fasilitas oleh dinas pemkot tersebut, ia kemudian merenovasi bangunan tersebut dengan merogoh kocek dari kantong pribadinya hingga lebih dari 100 juta. Tidak hanya itu, dana pribadinya juga ia alirkan untuk biaya penyediaan barang keperluan bimbel hingga biaya honor tenaga pengajar.

“Honor pengajar kan beda-beda, ada yang minta 600 ribu, ada yang minta 300 ribu, kita semi-sosial gitulah, tapi jangan sampai dirugikan waktu, dirugikan biaya, jadi mereka juga paham nggak sesuai UMR nggak sesuai hitungan jam mengajar,” katanya.





Hingga kini, bimbel yang ia dirikan telah menampung sekitar 400 anak.

Sekalipun Kompol Tatang mengeluarkan dana pribadinya untuk operasional bimbel yang ia dirikan, sedikitpun ia tak memungut biaya pada siswa bimbingannya. Namun demikian, dia juga mempersilakan jika orang tua siswa ingin menyumbang perlengkapan untuk bimbel.

"Kalau bapak/ibu mau bantu silakan, tapi kita tidak terima dalam bentuk uang, kalau masih kasih bunga, mau kasih bangku silakan, barang boleh, tapi kalau untuk dana nggak kita sampaikan sekarang, takut nanti malah jadi kontraproduktif," tuturnya.

Bak peribahasa sambil menyelam minum air, Kompol Tatang memanfaatkan kedekatannya terhadap generasi muda untuk sekaligus melakukan berbagai kampanye yang berkaitan dengan perannya sebagai anggota Polri. Mulai dari kampanye anti narkoba hingga keselamatan dalam lalu lintas telah ia sampaikan.

Kini, meskipun dirinya kembali dipindahtugaskan ke Polda Maluku sebagai Kasubbag Pullahjianta Bagdalops Roops, bimbel Cendekia Parahita masih tetap berjalan dan dalam pengawasannya.

Komitmen luar biasa yang ditunjukkan oleh Kompol Tatang dalam menyediakan bimbel gratis ini bukan hanya menjadi solusi bagi ratusan anak yang kesulitan memahami pelajaran, melainkan juga telah menjadi contoh nyata pengabdian di luar tugas formal kepolisian. Dedikasinya ini mendapatkan apresiasi penuh dari masyarakat, salah satunya tercermin dari adanya orang yang mengajukan namanya masuk nominasi Hoegeng Awards 2025 kategori polisi berdedikasi. [*]

Merajut Keberdayaan di Tepi Bengawan Solo

Komunitas Marcapada menjadi garda terdepan penanggulangan bencana, seperti mengevakuasi warga yang terjebak banjir atau menyediakan berbagai kebutuhan mendesak.

Berdinas di tepian Bengawan Solo, Aipda Rahmad Muhajirin telah menjadi bagian dari denyut kehidupan warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai legendaris itu. Bertempat tinggal di wilayah yang berbatasan langsung dengan sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut, membuat warga sekitar tak asing dengan ancaman banjir yang kerap menerjang ketika musim hujan datang.

Menyadari hal tersebut, pria yang lebih akrab disapa Aipda Jirin itu tak hanya duduk berpangku tangan. Jauh sebelum dirinya diangkat menjadi Bhabinkamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur, ia membentuk komunitas bernama Marcapada, sebuah komunitas yang mulanya dibentuk sebagai respons atas bencana banjir yang terjadi pada tahun 2007.





Komunitas yang memiliki kepanjangan dari Masyarakat Tanggap Bencana dan Peduli Sesama itu beranggotakan warga sekitar daerah tempatnya berdinis.

Meskipun sudah nyaris dua dekade sejak pembentukan komunitas tersebut, hingga kini Marcapada masih aktif menjadi garda terdepan penanggulangan bencana, seperti mengevakuasi warga yang terjebak banjir atau menyediakan berbagai kebutuhan mendesak.

Selain berperan dalam penanggulangan bencana, komunitas tersebut juga berperan besar dalam memitigasi bencana. Salah satu contoh nyata dari upaya Aipda Muhajirin bersama Marcapada dalam memitigasi bencana ialah melalui penanaman 1000

batang bambu di bantaran Sungai Bengawan Solo.

Langkah penanaman bambu itu bertujuan untuk memberikan perlindungan dari erosi tanah sekaligus membantu kelestarian sungai tersebut.

Bambu yang ditanam di sepanjang bantaran sungai kini menjadi penopang alami saat debit air meningkat, mencegah longsor yang kerap menjadi ancaman besar selama musim penghujan.

Sebagai Bhabinkamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, Aipda Muhajirin tidak hanya sekadar berfokus ke permasalahan banjir. Dirinya juga aktif berkontribusi dalam penyelesaian berbagai permasalahan lain di wilayah binaannya.



Sejak 2018, Aipda Muhajirin juga aktif dalam misi menghadirkan layanan kesehatan darurat bagi warga melalui pengadaan ambulans gratis. Inisiatif ini lahir dari keprihatinannya terhadap sulitnya akses layanan medis.

Mulanya, ia menggunakan mobil pribadinya untuk mengantar warga ke fasilitas kesehatan sebelum akhirnya mendapatkan dukungan dari Baitul Maal Wa Tamwil setempat yang menyumbangkan ambulans.

Tak hanya sebagai penyedia ambulans, Aipda Muhajirin juga sekaligus kerap turun langsung sebagai pengemudi untuk memastikan setiap warga mendapatkan penanganan medis tepat waktu.

"Dengan adanya mobil ambulans hasil kerja sama dengan pihak ketiga, alhamdulillah dapat mempermudah saya dalam membantu warga. Sehingga warga dapat menerima pelayanan kesehatan secara gratis dan

tindakan darurat dengan cepat," kata Aipda Muhajirin.

Bantu UMKM

Di lini kehidupan lain, Aipda Muhajirin juga pernah membantu UMKM daerah binaannya dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng yang sempat melanda. Mengingat terdapat lebih dari 230 UMKM pengusaha tahu di Kelurahan Ledok Kulon, hal tersebut membuat Aipda Muhajirin bergegas untuk berkoordinasi dengan Kapolsek, Kapolres, hingga





Dinas Perdagangan setempat untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng.

"Saya minta rekomendasi dari dinas perdagangan bagaimana saya bisa mendapatkan minyak langsung dari Surabaya, kita sampai sana dihubungkan pihak pabrik itu, karena kita mewakili koperasi tahu/tempe itu di pihak sana pabrik itu, memang ada aturan pemerintah untuk mengutamakan UMKM, sehingga kita mendapatkan minyak itu dan kita

distributed ke warga," kata Aipda Muhajirin.

Usahnya dalam membantu warga tidak hanya berhenti sampai di situ. Aipda Muhajirin bahkan membantu beberapa warganya untuk melaksanakan ibadah umroh. Ia menjadi penghubung antara warga dengan para donatur yang memfasilitasi ibadah umroh.

"Saya kan punya saudara kerja di Qatar, bosnya saudara itu memang setiap tahunnya memberangkatkan

"Saya keliling di kelurahan saya itu ada beberapa catatan orang layak, saya ajukan, saya bikin narasi, saya kirim sampai di-acc, sudah tiga orang yang berangkat, setiap tahun kan sekali,"

umrah gratis untuk warga yang memenuhi kriteria, di antaranya sudah mengabdikan di agama sekian tahun dengan ekonomi yang sangat minim. Saya keliling di kelurahan saya itu ada beberapa catatan orang layak, saya ajukan, saya bikin narasi, saya kirim sampai di-acc, sudah tiga orang yang berangkat, setiap tahun kan sekali," jelas Aipda Muhajirin.

Atas berbagai kontribusinya dalam membantu warga binaannya, Aipda Muhajirin mendapatkan piagam penghargaan sebagai juara 2 tingkat Polda Jawa Timur dalam pemilihan polisi teladan pada Polri sebagai penggerak revolusi mental sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik.

Apresiasi atas berbagai kontribusinya tersebut tidak berhenti di situ, warga binaannya yang merasakan langsung manfaat dari dedikasinya bahkan mengajukan Aipda Muhajirin sebagai nominasi dalam Hoegeng Awards 2025 untuk kategori Polisi Berdedikasi. [*]

Pengabdian yang Melampaui Keyakinan

Kisah pengabdian Aipda I Gede Arya Suantara menjadi simbol toleransi sekaligus bukti bahwa bakti kepada negara dan kasih sayang kepada sesama tidak mengenal batas agama.



Bunyi mesin motor dinas Polri menderum pelan di halaman TPQ wilayah Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Bukan untuk patroli atau pengejaran, melainkan untuk mengantarkan paket-paket rutin menjelang bulan Ramadan.

Aipda I Gede Arya Suantara perlahan mematikan mesin motor dinas, ia lantas dengan hati-hati melepaskan ikatan tali-tali pada paket-paket bawaannya.

Hari itu, anggota Bhabinkamtibmas Desa Gontoran tersebut datang dengan misi yang berbeda dari tugas sehari-harinya sebagai penegak hukum. Ia bukan membawa peringatan, melainkan membawa harapan.



Paket-paket yang ia bawa tersebut membawa harapan untuk anak-anak Desa Gontoran. Aipda Arya membawa berbagai keperluan belajar-mengajar di TPQ, mulai dari iqra, al-Qur'an, alat penyangga al-Qur'an, hingga tikar. Barang-barang tersebut tidak hanya menjadi alat bantu pembelajaran, tetapi telah menjadi simbol komitmen dan kepedulian yang ditunjukkan Aipda Arya kepada generasi muda Desa Gontoran.

"Saya ingin anak-anak di desa ini tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, dan memiliki kepedulian sosial," ungkap Aipda Arya.

Sekalipun Aipda Arya bukan seorang muslim, melainkan penganut agama Hindu, perbedaan keyakinan tersebut tidak pernah menjadi penghalang untuk membantu sesama. Ia justru menjelma menjadi simbol toleransi yang hidup dan menjadi bukti nyata bahwa bakti kepada negara dan kasih sayang kepada sesama

tidak mengenal batas agama. Tak tanggung-tanggung, kegiatan rutin setiap menjelang bulan Ramadan ini telah Aipda Arya lakukan sejak 2019 silam.

"Ini adalah bentuk perhatian saya kepada warga binaan, khususnya anak-anak yang belajar mengaji di TPQ. Saya ingin memastikan mereka memiliki fasilitas yang cukup agar bisa menjalankan ibadah dengan lancar, terutama menjelang puasa," kata Aipda Arya.

Dirinya rutin membagikan

berbagai paket-paket keperluan belajar-mengajar di TPQ-TPQ desa binaannya. Paket-paket tersebut ia beli menggunakan dana operasional Bhabinkamtibmas.

Toleransi yang ditunjukkan oleh Aipda Arya tersebut akhirnya banyak mengetuk hati berbagai orang. Aipda Arya menyebut bahwa dirinya banyak mendapatkan bantuan dari para donatur yang datang menyumbang untuk mendukung programnya dalam upaya pengadaan keperluan belajar-mengajar di TPQ.

Tidak hanya membantu di TPQ, Aipda Arya juga aktif membantu umat Hindu di Pura Kecamatan Lingsar. "Saya memberikan sarana kontak berupa tikar, kain putih kuning, dupa, dan kalung Ganesha," jelas Aipda Arya.

Hubungan Harmonis

Dengan tajuk Bhabinkamtibmas Peduli Tempat Ibadah, Aipda Arya menunjukkan dedikasi Aipda Arya untuk menjaga keberagaman dan mempererat tali silaturahmi antarpemeluk agama. Dengan memberikan perhatian yang sama kepada tempat-tempat ibadah di desanya, ia membuktikan bahwa pelayanan dan kepedulian tidak terbatas pada satu golongan saja.

"Tugas kami sebagai polisi tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan mempererat persaudaraan antar umat beragama," kata Aipda Arya.

Kegiatan yang dilakukan oleh Aipda Arya ini mendapatkan respons positif dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga kapolres Mataram turut serta memberikan apresiasi terhadapnya. Ia mendapatkan piagam penghargaan dari Kapolres Mataram atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun harmoni di tengah masyarakat yang beragam.





Bahkan, apresiasi atas tindakan nyata Aipda Arya dalam membangun harmoni lintas agama tidak hanya berhenti pada penghargaan lokal, melainkan meluas hingga ia masuk dalam nominasi Hoegeng Awards 2025.

Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi dan integritas anggota Polri yang memberikan dampak positif kepada masyarakat. Ia masuk ke dalam nominasi penghargaan Polisi Berdedikasi.

Pengusulan nama Aipda Arya untuk penghargaan tersebut bukan datang dari dirinya sendiri, melainkan hasil dari rekomendasi masyarakat yang sangat tertarik dengan tindakannya. Kehadirannya yang penuh perhatian di tengah masyarakat Desa Gontoran dan dedikasinya terhadap keberagaman menjadi alasan kuat di balik dukungan tersebut. [*]

“Tugas kami sebagai polisi tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan mempererat persaudaraan antar umat beragama,”





Sang anak digendong menjauh agar tidak menimbulkan pengalaman traumatis yang mengganggu masa depannya.

Tak mau anak kecil menjadi trauma berkepanjangan karena menyaksikan adegan kekerasan di depan mata, Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar segera bertindak cepat dengan menggendong bocah itu dan membawanya menjauh dari tempat kejadian. Ia membawa anak itu ke kantor Satpol PP Kendal yang terletak tak jauh dari lokasi.

Di tempat itu, ia mencoba menenangkan si anak dengan mengajaknya bicara dan bercerita. Barulah setelah tenang, anak itu kembali digendong Hendry ke Mapolres Kendal dan menyerahkannya kepada petugas Polwan.

"Supaya anak tidak melihat kejadian, langsung saya gendong dan tak bawa ke kantor Satpol PP Kendal, yang tidak jauh dari kejadian. Saya takut anak trauma. Kasihan juga anak itu," kata Hendry menjelaskan.

Aksi Humanis Kapolres Kendal

**JAUHKAN ANAK DARI PENGALAMAN
TRAUMATIS**



"Di bagian perlindungan anak, anak tersebut sudah bercanda dengan Polwan dan bermain sambil tertawa. Setelah semua proses selesai, petugas menghubungi istri pelaku untuk menjemput anak mereka. Lalu sang anak dibawa pulang oleh ibunya."

Bukan semata-mata soal penegakkan hukum, aksi sigap Hendry dilatari pertimbangan matang agar si anak tak mengalami kondisi traumatis akibat peristiwa yang dipicu aksi ugal-ugalan sang bapak di Jalan Soekarno-Hatta, Kendal, Kamis siang, 5 Juni 2025.

Bermula dari iring-iringan Kapolres Kendal yang tengah melintas, tiba-tiba sebuah KIA Picanto berkelir putih melaju zig-zag dan membuat panik pengguna jalan lainnya.

Tak membiarkan bahaya terjadi di depan mata, sejumlah petugas Patwal Satlantas dengan persuasif mencoba menghentikan mobil itu. Bukannya berhenti, sang pengemudi justru ngotot dan mencoba kabur. Bahkan, di Jalan Sukarno-Hatta, tidak jauh dari Mapolres Kendal dari belakang si pengemudi itu bertindak nekad dengan menabrak mobil patwal dan mendorongnya hingga 100 meter.

Tak berhenti dengan menabrak, pengemudi itu bahkan langsung turun dan memaksa membuka pintu mobil patroli dan berteriak mengaku sebagai anggota Kostrad. Ia juga menyerang Bripkas Muhammad Agil Setiawan yang berada di dalam mobil dan memukul bagian dada dan memelintir kaki kanannya hingga cedera serta mencoba menyeretnya keluar mobil.

Tak tinggal diam, personel lain termasuk Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar yang memang berada dalam rombongan segera bertindak mengamankan pengemudi mobil. Aksi brutal itu akhirnya berhasil dihentikan pengawal Kapolres yang langsung membekuk pelaku di tempat.

Setelah berhasil diamankan, BH justru memberontak dengan tenaga besar hingga borgol yang dikenakan sempat putus. "Kalau tidak salah, dua kali kami borgol. Tapi borgolnya putus. Tenaganya besar," kata Hendry.

Pengaruh Narkoba

Aksi bak film Holywood itu terekam kamera berdurasi 8 menit 39 detik dan menjadi viral saat beredar di dunia maya. Di video jelas terlihat bagaimana si pengemudi mencoba melawan petugas yang hendak mengamankannya.

Di tengah upaya tersebut, si pengemudi mengaku sebagai anggota Kostrad dan menyebut ada anak kecil di dalam mobilnya. Pengakuan itu justru memicu kecurigaan terhadap terjadinya penculikan.

Setelah diamankan, pelaku yang belakangan diketahui berinisial Budi Hartono alias Budi Cobra warga Dusun Kalijaran, Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kendal, menjalani tes urine dan pemeriksaan di Mapolres Kendal.

Tes urine dilakukan karena saat diamankan petugas, kondisi pelaku sangat tidak wajar atau setengah sadar. Benar saja, hasil sementara tes urine BH positif menggunakan zat metamfetamin yakni narkoba jenis sabu.

Sementara dari pendalaman diketahui, Budi memakai sabu sekitar pukul 10.00 pagi. Ia juga menenggak miras jenis bir serta congkang. Dari dalam mobil, polisi juga menemukan dua bilah sangkur, dua magasen laras panjang, softgun, dan alat isap sabu alias bong.

"Untuk hasil sementara tes urine yang dilakukan terhadap pelaku, pelaku ini positif menggunakan zat metamfetamin yakni narkoba jenis sabu. Tapi untuk lebih validnya, kami masih tunggu hasil dari Labfor Semarang," kata Hendry.

Sementara terkait pengakuan Budi sebagai anggota Kostrad, Kapolres Kendal memastikan bahwa dia bukan lagi anggota militer aktif. Pernyataan tersebut diperkuat Komandan Kodim 0715 Kendal, Letkol Inf Ely Purwadi.

"Memang yang bersangkutan dulunya pernah bertugas di Kostrad terus pindah ke Kodim 0715 Kendal. Tapi sejak tahun 2018, yang bersangkutan sudah bukan anggota lagi karena di-PTDH-kan," kata Letkol Ely.

Karena yang bersangkutan sudah bukan militer lagi, maka kasus hukumnya diserahkan kepada kepolisian.

"Kan yang bersangkutan sudah menjadi masyarakat sipil, jadi kalau yang bersangkutan ada kaitan dengan kasus hukum tentunya kami serahkan prosesnya kepada kepolisian," tegas Ely.[*]





POLRI UNTUK MASYARAKAT

Tulus Melayani dan Mengayomi



INOVASI DIVHUMAS

Biro Penmas Polri
Majalah Tribrata News
Tersedia Online



www.humas.polri.go.id